

**PERAN BELANJA MODAL DALAM MEMODERASI
HUBUNGAN ANTARA RASIO KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN IPM
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023)**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Landung Aji Pradana
NIM : 31402300141

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

**PERAN BELANJA MODAL DALAM MEMODERASI
HUBUNGAN ANTARA RASIO KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN IPM
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023)**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Landung Aji Pradana

Nim : 31402300141

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

SKRIPSI

PERAN BELANJA MODAL DALAM MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN IPM (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023)


Disusun Oleh :

Landung Aji Pradana

Nim : 31402300141

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
bisa diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 November 2024
Pembimbing,


Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt.
NIK. 211406018

**PERAN BELANJA MODAL DALAM MEMODERASI
HUBUNGAN ANTARA RASIO KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN IPM
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023)**


Disusun Oleh :
Landung Aji Pradana
Nim : 31402300141


Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 29 November 2024

Susunan Dewan Penguji


Penguji,

Penguji,


Prof. Dr. Kiryanto, SE, M.Si., Akt., CA.
NIK. 211492004



Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA
NIK. 210493034

Pembimbing,


Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt.
NIK. 211406018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat
Gelar Sarjana Akuntansi, 29 November 2024

Ketua Program Studi Akuntansi


Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak, CA,AWP, IFP.PhD
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Landung Aji Pradana

NIM : 31402300141

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

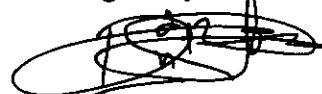
Dengan ini mengatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Peran Belanja Modal Dalam Memoderasi Hubungan Antara Rasio Keuangan Pemerintah Daerah dan IPM (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023)”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 29 November 2024
Yang Menyatakan,



Landung Aji Pradana
NIM. 31402300141

**PERAN BELANJA MODAL DALAM MEMODERASI HUBUNGAN
ANTARA RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN IPM
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023)**

**Oleh :
Landung Aji Pradana**

ABSTRAK

Studi ini diharapkan untuk mengkaji peran belanja modal dalam memoderasi hubungan antara rasio keuangan pemerintah daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021-2023. Rasio keuangan yang diteliti meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efektivitas pajak daerah. Pengumpulan data dijalankan dengan memakai data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan keuangan pemerintah daerah.

Teknik analisis yang dipakai ialah regresi linier berganda dengan variabel moderasi untuk menguji dampak rasio keuangan pada IPM serta peran belanja modal dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM, (2) rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM, (3) rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM, (4) rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap IPM, dan (5) rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh positif terhadap IPM. Selain itu, alokasi belanja modal ditemukan memiliki peran moderasi signifikan, di mana belanja modal memperkuat pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas pajak daerah terhadap IPM. Namun, belanja modal memperlemah pengaruh rasio derajat desentralisasi dan rasio efektivitas PAD terhadap IPM.

Studi ini diharapkan dapat memberikan bantuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Belanja Modal, Rasio Keuangan Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten/Kota, Jawa Tengah.

**THE ROLE OF CAPITAL EXPENDITURE IN MODERATING THE
RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL RATIOS
AND HDI**

**(An Empirical Study on Regencies/Cities in Central Java Province for the
Period 2021-2023)**

**By :
Landung Aji Pradana**

ABSTRACT

This study is expected to examine the role of capital expenditure in moderating the relationship between local government financial ratios and the Human Development Index (HDI) in Regencies/Cities of Central Java Province during the 2021-2023 period. The financial ratios studied include the degree of decentralization ratio, local government financial dependency ratio, local government financial independence ratio, effectiveness ratio of Local Own-Source Revenue (PAD), and regional tax effectiveness ratio. Data collection is conducted using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and local government financial reports.

The analysis technique used is multiple linear regression with a moderating variable to test the impact of financial ratios on the HDI as well as the role of capital expenditure in that relationship. The results reveal that: (1) the degree of decentralization ratio positively affects the HDI, (2) the financial dependency ratio negatively affects the HDI, (3) the financial independence ratio negatively affects the HDI, (4) the effectiveness ratio of PAD positively affects the HDI, and (5) the regional tax effectiveness ratio positively affects the HDI. Furthermore, capital expenditure is found to have a significant moderating role. It strengthens the influence of the financial dependency ratio, financial independence ratio, and regional tax effectiveness ratio on the HDI. However, it weakens the effect of the degree of decentralization ratio and the effectiveness ratio of PAD on the HDI.

This study is expected to provide support to local governments in managing finances effectively and efficiently to promote sustainable human development.

Keywords: *Capital Expenditure, Local Government Financial Ratios, Human Development Index (HDI), Regencies/Cities, Central Java.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi dengan baik yang berjudul **“Peran Belanja Modal Dalam Memoderasi Hubungan Antara Rasio Keuangan Pemerintah Daerah dan IPM (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi dalam rangka menuntaskan studi Strata Satu untuk mendapat gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamnya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE, MSi, Ak, CA,AWP, IFP.PhD, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Kiryanto, SE, M.Si., Akt., CA. dan bapak Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya.
6. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
7. Ibunda Sutini dan Ayanda Amad Solikin beserta Ibunda mertua Khoiriyah dan Ayanda mertua Mohammad Sihab yang senantiasa memberikan motivasi. Berkat kasih sayang, pengorbanan, dorongan, dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Istri tercinta Hilma Shofa Syiana atas perannya yang luar biasa baik dari segi moril maupun materil sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Sandi Priyo Wibowo, adik penulis yang senantiasa menemani penulis, memberikan semangat, dan kebahagiaan.

Penulis memahami bahwasanya masih ada batasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini bisa berguna dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2024
Yang Menyatakan,



Landung Aji Pradana
NIM. 31402300141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 <i>Problem Statement</i>	6
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 <i>Grand Teory</i>	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 Otonomi Daerah	13
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	14

2.2	Variabel Penelitian.....	15
2.2.1	Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
2.2.2	Belanja Modal	19
2.2.3	Indeks Pembangunan Manusia.....	21
2.3	Literature Review Penelitian Terdahulu	24
2.4	Pengembangan Hipotesis.....	29
2.4.1	Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	29
2.4.2	Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	30
2.4.3	Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	32
2.4.4	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia	33
2.4.5	Pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	34
2.4.6	Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Dimoderasi Alokasi Belanja Modal	36
2.4.7	Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Dimoderasi Alokasi Belanja Modal	37

2.4.8	Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Dimoderasi Alokasi Belanja Modal	40
2.4.9	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Dimoderasi Alokasi Belanja Modal	42
2.4.10	Pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Dimoderasi Alokasi Belanja Modal	44
2.5	Kerangka Pemikiran Teoritis	45
BAB III METODE PENELITIAN.....		46
3.1	Jenis Penelitian	46
3.2	Populasi dan Sampel.....	46
3.2.1	Populasi	46
3.2.2	Sampel.....	47
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	47
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	48
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	48
3.5.1	Variabel Dependen	48
3.5.2	Variabel Independen	49
3.5.3	Variabel Pemoderasi	52
3.6	Alat Analisis	53

3.6.1	Uji Statistik Deskriptif	53
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	53
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	56
3.6.4	Pengujian Hipotesis.....	56
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		58
4.1	Deskriptif Sampel	58
4.2	Analisis Data.....	59
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	59
4.2.2	Pengujian Asumsi Klasik	66
4.2.3	Pengujian Kelayakan Model	72
4.3	Pembahasan	82
4.5.1.	Hubungan Rasio Derajat Desentralisasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah..	83
4.5.2.	Hubungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah...	84
4.5.3.	Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah...	86
4.5.4.	Hubungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah...	87
4.5.5.	Hubungan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	89

4.5.6. Hubungan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Rasio Derajat Desentralisasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah.....	90
4.5.7. Hubungan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.....	91
4.5.8. Hubungan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah.....	93
4.5.9. Hubungan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.....	95
4.5.10. Hubungan Analisis Belanja Modal Memoderasi Rasio Efektifitas Pajak Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.....	96
BAB V PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Implikasi	99
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	101
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	103
DAFTAR PUSTAKA	106

LAMPIRAN 109



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rincian Penyajian Data	58
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif	60
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4. 4 Kesimpulan Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas	68
Tabel 4. 6 Kesimpulan Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi	69
Tabel 4. 8 Kesimpulan Hasil Uji Autokorelasi	70
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heterokedastisitas	71
Tabel 4. 10 Kesimpulan Uji Heterokedastisitas	71
Tabel 4. 11 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	73
Tabel 4. 12 Kesimpulan Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	73
Tabel 4. 13 Hasil Uji R^2	74
Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	2
Gambar 1. 2 Grafik Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	3
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap IPM .	45
Gambar 4. 1 Hasil Uji Scatterplot.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

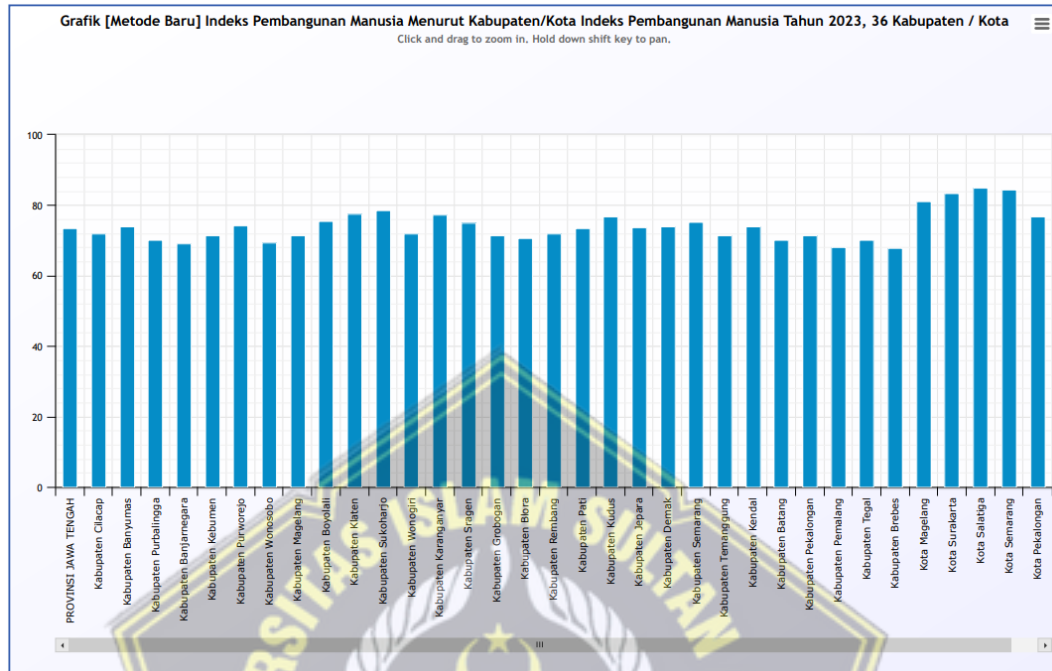
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan manusia ialah salah satu pilar perkembangan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perkembangan manusia dapat ditaksir dengan memakai indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menilai capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar kualitas hidup yaitu umur yang panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

IPM digunakan untuk mengevaluasi efektivitas perkembangan manusia di suatu daerah lewat penyajian layanan umum yang optimal. Jika manajemen keuangan daerah dijalankan dengan baik, maka akan berdampak positif pada ketersediaan layanan publik. Adanya pelayanan publik yang berkualitas diinginkan bisa menaikkan kualitas hidup masyarakat. Kenaikan kualitas hidup masyarakat ini tercermin dalam peningkatan IPM.

Untuk meraih tingkat IPM yang optimal masih menjadi tantangan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini tercermin dari temuan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diuraikan dalam Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. 1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



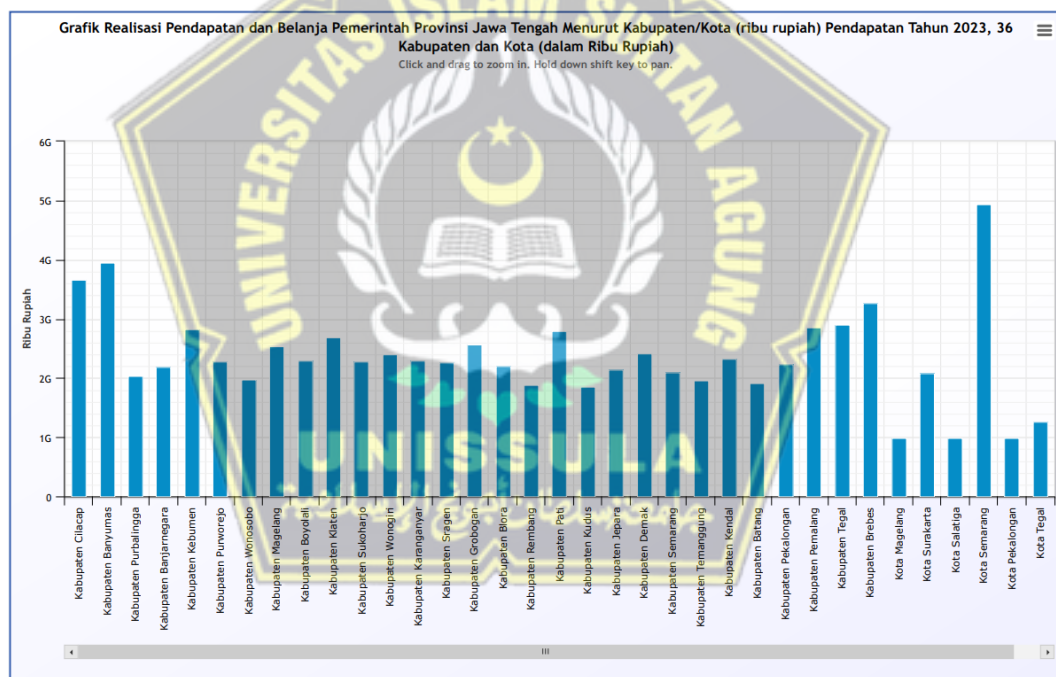
Sumber: jateng.bps.go.id

Terdapat sebagian kawasan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang nilai IPMnya masih rendah dan juga terdapat sebagian kawasan yang tingkat IPMnya tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat jarak tingkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah ditampilkan pada grafik tersebut. Terlihat dari grafik jika masih ada Kabupaten/Kota dengan IPM yang belum tinggi, yang terdiri dari Kabupaten Brebes (67,95), Kabupaten Pemalang (68,03), Kabupaten Banjarnegara (69,14), Kabupaten Wonosobo (69,37), Kabupaten Batang (70,20). Sedangkan Kabupaten/Kota yang indeks pembangunan manusianya tinggi yaitu, Kota Salatiga (84,99), Kota Semarang (84,43), Kota Surakarta (83,54), Kota Magelang (81,17), Kabupaten Sukoharjo (78,65).

Jika dilihat dari data realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki nilai

realisasi pendapatan tinggi seperti (dalam ribuan rupiah): Kota Semarang (4.943.153.169), Kabupaten Banyumas (3.942.165.949), Kabupaten Cilacap (3.664.111.864), Kabupaten Brebes (3.258.452.215), Kabupaten Tegal (2.901.606.723). Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai realisasi pendapatan rendah seperti (dalam ribuan rupiah): Kota Salatiga (981.034.599), Kota Pekalongan (988.198.191), Kota Magelang (991.691.941), Kota Tegal (1.267.780.719), Kabupaten Kudus (1.848.490.330).

Gambar 1. 2 Grafik Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: jateng.bps.go.id

Berdasarkan data tersebut terdapat anomali antara nilai IPM dan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya pola yang menarik. Meskipun terdapat beberapa wilayah dengan nilai IPM yang rendah, seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Batang, namun beberapa di antaranya

memiliki realisasi pendapatan yang relatif tinggi. Sebaliknya, terdapat juga wilayah dengan nilai IPM tinggi, seperti Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kabupaten Sukoharjo, namun memiliki realisasi pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah lain.

Dalam menjalankan pembangunan manusia, pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek-aspek keuangan yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Analisis mengenai anomali antara tingkat IPM dengan realisasi pendapatan di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah menyoroti kompleksitas hubungan antara pembangunan manusia dan kesejahteraan finansial. Pembangunan manusia, tercermin dalam IPM, merupakan hasil dari berbagai faktor termasuk pendapatan, alokasi belanja modal, dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Rasio keuangan daerah, yang mencakup beragam indikator seperti derajat desentralisasi, keterikatan, kemandirian, efektivitas PAD, dan efektivitas pajak, menjadi titik fokus dalam memahami dinamika ini. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan dalam mendukung pembangunan manusia.

Dalam konteks ini, alokasi belanja modal menjadi relevan sebagai variabel moderasi karena dapat memengaruhi hubungan antara keuangan daerah dan pembangunan manusia. Alokasi belanja modal tidak hanya mencerminkan prioritas dan strategi pembangunan pemerintah daerah, tetapi juga merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan. Dengan memasukkan alokasi belanja modal sebagai variabel moderasi, studi ini dituju untuk mengeksplorasi sejauh mana efek dari rasio

keuangan daerah terhadap IPM dapat dimoderasi oleh efisiensi dan efektivitas alokasi belanja modal tersebut.

Pada studi yang dikerjakan oleh Hendri & Yafiza (2020), ada interaksi yang kuat antara tingkat desentralisasi, rasio keterikatan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas perolehan asli daerah, dan rasio kinerja pajak daerah. Semua faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi indeks perkembangan manusia. Sebaliknya, studi yang dikerjakan oleh Evlyn & Rahayu (2018) menyatakan jika tingkat desentralisasi berdampak positif pada indeks pembangunan manusia, namun rasio kemandirian keuangan daerah memiliki dampak negatif. Rasio kinerja perolehan asli daerah, pada penelitian tersebut, tidak mempunyai dampak pada indeks perkembangan manusia. Sementara itu, studi oleh Harliyani & Haryadi (2016), menyatakan jika rasio derajat desentralisasi fiskal dan keselarasan belanja langsung berdampak positif dan penting pada IPM, namun rasio keterikatan keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ketepatan PAD tidak bermakna berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berbagai studi telah membahas peran belanja modal dalam menengahi unsur utama IPM. studi Verawaty & Salwa (2023) mendeteksi jika belanja modal hanya bisa menengahi interaksi antara DAU dan DBH pada IPM, namun PAD, SiLPA, DAK, PDRB, tingkat jumlah masyarakat tidak berdampak pada IPM lewat belanja modal. Sedangkan, Wulandari *et al.* (2018) menyatakan dalam studinya jika DAU, DBH, DAK, PAD, lain-lain perolehan daerah, dan surplus/defisit menyebabkan IPM lewat belanja modal. Berikutnya, Pratama & Kartika (2017)

dalam studinya mendeteksi jika PAD dan SiLPA berdampak positif dan penting pada IPM lewat belanja modal.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian interaksi antara keuangan daerah dan perkembangan manusia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan studi yang lalu yang cenderung memfokuskan pada pengaruh langsung rasio keuangan daerah pada Indeks Perkembangan Manusia (IPM), studi ini menghadirkan perspektif baru dengan memasukkan penyaluran belanja modal sebagai aspek moderasi. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi lebih mendalam tentang bagaimana alokasi penggunaan belanja modal bisa menguatkan atau memperlemah dampak rasio keuangan daerah pada IPM.

Menurut jabaran di atas, maka dijalankan studi dengan judul **“Peran Belanja Modal Dalam Memoderasi Hubungan Antara Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Dan IPM (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023)”**.

1.2 Problem Statement

Terdapat peran penting manajemen keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup orang, yang tergambar melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi petunjuk utama dalam menghitung keberhasilan perkembangan manusia yang meliputi tiga aspek dasar, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang dapat memicu peningkatan

IPM. Namun, masih terdapat gap antara realisasi pendapatan daerah dan capaian IPM di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Anomali ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara rasio keuangan daerah, seperti derajat desentralisasi, keterikatan, kemandirian, ketepatan PAD, dan efektivitas pajak, terhadap IPM. Di sisi lain, penyaluran belanja modal yang dijalankan oleh pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai alat moderasi yang memperkuat atau melemahkan dampak rasio keuangan tersebut pada IPM.

Beberapa studi terdahulu telah menyoroiti peran belanja modal dalam memoderasi hubungan antara berbagai faktor keuangan daerah dan IPM. Namun, masih terdapat ketidakpastian mengenai sejauh mana belanja modal bisa memoderasi efek rasio keuangan daerah pada IPM, terutama dalam konteks Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan variasi yang signifikan dalam hal IPM dan realisasi pendapatan. Beberapa daerah dengan pendapatan tinggi memiliki IPM yang rendah, sementara daerah dengan IPM tinggi justru memiliki pendapatan yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam interaksi antara pendapatan, belanja modal, dan pembangunan manusia.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, studi ini diharapkan untuk mengeksplorasi apakah alokasi belanja modal dapat memoderasi hubungan antara rasio keuangan pemerintah daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari studi ini diinginkan bisa memberikan andil penting dalam pemahaman tentang bagaimana penataan

keuangan daerah dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut penjelasan masalah yang sudah dikemukakan diatas, penulis bisa menyatakan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Apakah rasio derajat desentralisasi dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap IPM?
2. Apakah rasio ketergantungan keuangan daerah dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap IPM?
3. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap IPM?
4. Apakah rasio efektivitas pendapatan asli daerah dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap IPM?
5. Apakah rasio efektivitas pajak daerah dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap IPM?
6. Apakah alokasi belanja modal berperan dalam memperkuat pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap IPM?
7. Apakah alokasi belanja modal berperan dalam memperkuat pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap IPM?
8. Apakah alokasi belanja modal berperan dalam memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM?

9. Apakah alokasi belanja modal berperan dalam memperkuat pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, terhadap IPM?
10. Apakah alokasi belanja modal berperan dalam memperkuat pengaruh rasio efektivitas pajak daerah terhadap IPM?

1.4 Tujuan Penelitian

Studi ini dituju untuk mencapai:

1. Untuk menyimpulkan dan menganalisis efek Rasio Derajat Desentralisasi pada laporan keuangan pada IPM.
2. Untuk menyimpulkan dan menganalisis efek Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada laporan keuangan pada IPM.
3. Untuk menyimpulkan dan menganalisis efek Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada laporan keuangan pada IPM.
4. Untuk menyimpulkan dan menganalisis efek Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada laporan keuangan pada IPM.
5. Untuk menyimpulkan dan menganalisis efek Rasio Efektivitas Pajak Daerah pada laporan keuangan pada IPM.
6. Untuk menyimpulkan dan menganalisis moderasi penyaluran belanja modal dalam mengokohkan efek rasio derajat desentralisasi pada IPM.
7. Untuk menyimpulkan dan menganalisis moderasi penyaluran belanja modal dalam mengendorkan efek rasio keterikatan keuangan daerah pada IPM.
8. Untuk menyimpulkan dan menganalisis moderasi penyaluran belanja modal dalam mengokohkan efek rasio kemandirian keuangan daerah pada IPM.

9. Untuk menyimpulkan dan menganalisis moderasi penyaluran belanja modal dalam memperkuat rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada IPM.
10. Untuk menyimpulkan dan menganalisis moderasi penyaluran belanja modal dalam memperkuat efek rasio efektivitas pajak daerah pada IPM.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil studi ini diinginkan berguna untuk:

1. Studi ini bertujuan untuk membagi andil teoritis dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah, alokasi belanja modal, perkembangan ekonomi, dan pembangunan manusia.
2. Bagi pemerintah daerah studi ini diinginkan bisa memberikan informasi sekaligus referensi yang relevan untuk menentukan langkah strategis dalam mengurai perolehan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta merencanakan penyaluran belanja modal guna kenaikan standar layanan publik dan percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Grand Teory*

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut teori keagenan, inetraksi keagenan adalah keterikatan di mana satu atau lebih prinsipal menyerahkan otoritas kepada orang lain (agen) untuk hakekat mereka. Jika ada masalah dengan hubungan keagenan, terjadi asimetri informasi dan konflik pribadi (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan mencoba menjelaskan inetraksi antara agen dan atasan dengan memakai prosedur perjanjian. Teori ini menekankan pada pemecahan dua masalah: a) masalah keagenan, yang terjadi ketika harapan dan target antara agen dan atasan berbeda, dan b) masalah risiko timbul akibat perbedaan preferensi dan sikap antara prinsipal dan agen.

Salah satu fokus teori keagenan (Eisenhardt, 1989) ialah menemukan kontrak yang paling efektif untuk menata interaksi antara atasan dan agen dengan dugaan jika: a) manusia memiliki sifat individualis, rasionalitas terbatas (rasionalitas terbatas), dan keraguan pada resiko (risk aversion); b) organisasi memiliki perbedaan kepentingan antar anggotanya, dan c) informasi adalah barang yang dapat dibeli.

Dalam studi ini, teori keagenan dipakai sebagai dasar untuk menjabarkan perselisihan terkait kebijakan keuangan daerah antara pemerintah daerah dan masyarakat yang disampaikan oleh DPRD. Hal ini

disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang ada di antara pihak yang terlibat pada suatu kontrak. Bahkan jika pemerintah ingin menyenangkan atasan, kontrak tersebut juga berharap untuk mengoptimalkan keinginannya.

Hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah menunjukkan teori keagenan dalam penelitian ini. Pemerintah dan masyarakat berhubungan seperti agen dan principal. Pemerintah bertindak sebagai agen, dan masyarakat disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai principal. Diharapkan bahwa agen menentukan keputusan keuangan yang menguntungkan principal. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur agen dan menyuguhkan sumber daya kepada mereka melalui pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil penataan kekayaan daerah, dan sumber perolehan lainnya yang sah.

Sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mengatur pemerintahan, perkembangan, dan jasa masyarakat, pemerintah daerah harus mengungkapkan catatan penjelasan keuangan daerahnya. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian tentang apakah pemerintah daerah tuntas melakukan fungsinya dengan baik atau tidak. Masalah keagenan akan muncul jika keputusan agen merusak principal. Principal perlu pihak ketiga yang dapat menjamin principal jika laporan agen adalah benar karena mereka tidak menyadari faktanya dijalankan oleh agen.

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah ialah hak yang diajukan kepada daerah otonom untuk menata dan menangani masyarakatnya sejalan dengan keinginan mereka sendiri, menurut ambisi masyarakat serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang sah (Halim, 2007). Dalam konteks ini, otonomi daerah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai tugas. Salah satu tugas pokok pemerintah daerah yang diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ialah untuk mengatur otonomi sejauh mungkin, kecuali dalam hal-hal yang merupakan urusan pemerintahan pusat, dengan target menaikkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing daerah (Anggraini, 2015).

Mengacu pada Mardiasmo (2004) dalam perspektif teoritis, otonomi daerah diinginkan dapat mengeluarkan dua hasil nyata, yakni:

- a. Meningkatkan partisipasi, inisiatif, dan kreasi masyarakat dalam proses perkembangan, serta menyokong penyelarasan hasil perkembangan di semua wilayah, dengan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada di tiap daerah.
- b. Memulihkan penyaluran sumber daya produktif dengan memindahkan peran perolehan ketetapan umum ke tingkat pemerintahan yang paling rendah, yang mempunyai ulasan yang lebih komprehensif.

Mengacu pada Halim (2007), ciri khas suatu daerah yang dapat menjalankan otonomi adalah:

- a. Kapabilitas keuangan daerah, menandakan bahwa daerah tersebut mampu mencari sumber keuangan, mengatur, dan memakai keuangannya sendiri untuk menanggung pelaksanaan pemerintahan.
- b. Minimalkan keterikatan pada bantuan pusat semaksimal mungkin, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi asal keuangan utama, disokong oleh aturan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Tingkat kemandirian yang tinggi menandakan jika suatu daerah mampu mendanai kebutuhannya tanpa memerlukan bantuan pemerintah pusat. Ketika dihubungkan dengan kemandirian fiskal, yang mengukur seberapa besar andil Perolehan Asli Daerah terhadap total perolehan daerah, hal ini memungkinkan evaluasi kinerja keuangan daerah secara menyeluruh.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan ialah dokumentasi tentang keuangan suatu entitas yang disiapkan untuk keperluan internal dan eksternal dari unit tersebut. Laporan keuangan daerah ialah dokumen keuangan yang dirancang oleh pemerintah daerah yang diarahkan khususnya untuk pihak di luar pemerintah daerah tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 169 ayat (2g) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang mencakup catatan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah diatur dengan peraturan (Halim, 2007).

Paragraf 28 dalam dasar pemikiran standar akuntansi pemerintahan menjabarkan bahwa bagian utama laporan keuangan terdapat dari: (a) Laporan realisasi anggaran (LRA), (b) Laporan perubahan saldo anggaran

lebih (SAL), (c) Neraca, (d) Laporan operasional (LO), (e) Laporan arus kas (LAK), (f) Laporan perubahan ekuitas (LPE), dan (g) Catatan atas laporan keuangan (CALk). Namun, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya diharuskan merancang laporan keuangan yang terdiri dari: (a) Laporan realisasi anggaran (LRA), (b) Neraca, (c) Laporan operasional (LO), (d) Laporan perubahan ekuitas (LPE), dan (e) Catatan atas laporan keuangan (CALk).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun setiap periode akan mencakup rencana anggaran serta pencapaian aktual dari budget tersebut. Dengan membandingkan budget yang telah ditentukan dengan realisasinya, dapat dilihat bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan mereka. Selain dua aspek tersebut, masih terdapat banyak informasi lain dalam catatan keuangan pemerintah daerah yang bisa berguna untuk menilai efisiensi atau tujuan-tujuan lainnya.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio keuangan pemerintah daerah adalah skala evaluasi antara dua atau lebih variabel keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan daerah. Rasio keuangan dapat dipakai untuk mengkaji efisiensi keuangan pemerintah daerah, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun kemandirian.

Indikator kinerja pemerintah daerah mencakup berbagai rasio, seperti rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, rasio keterikatan keuangan

daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio kinerja pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2012).

2.2.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Kapabilitas pemerintah daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung perkembangan bisa diukur lewat konsep derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi merupakan indikator tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (Mahmudi, 2012).

Perhitungan derajat desentralisasi dilakukan dengan mengkomparasikan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pemasukan daerah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana PAD berkontribusi pada jumlah pemasukan daerah. Semakin tinggi andil PAD, semakin besar kapabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi. Penilaian derajat otonomi fiskal juga dapat dilakukan dengan mengukur persentase Pemasukan Asli Daerah pada total perolehan daerah (Munir, 2004).

2.2.1.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah mencerminkan seberapa besar sebuah pemerintah provinsi mengandalkan perolehan yang didapat dari transfer pemerintah pusat. Biasanya, sumbangan terbesar dari perolehan transfer berasal dari dana perimbangan, seperti dana penyaluran umum, yang bertujuan untuk menyeimbangkan keadaan keuangan di seluruh daerah (Mahmudi, 2012). Tingkat keterikatan keuangan daerah bisa

diukur dengan mengkomparasikan jumlah dana transfer yang didapat oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi perbandingan ini, semakin besar tingkat keterikatan pemerintah daerah pada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

2.2.1.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar keterikatan keuangan daerah pada asal pendanaan eksternal. Ketika rasio kemandirian keuangan daerah tinggi, maka keterikatan pemerintah provinsi pada pemerintah pusat akan menurun, dan sebaliknya (Mahmudi, 2012).

Tingkat kemandirian keuangan daerah tidak hanya menyiratkan kapabilitas pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan sendiri, tetapi juga mencerminkan tingkat andil masyarakat dalam perkembangan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin besar andil masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah ialah sumber utama perolehan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam menyetor pajak dan retribusi daerah, semakin meningkat pula standar hidup masyarakat.

Menurut Halim (2007), rasio kemandirian menyiratkan seberapa besar keterikatan suatu daerah pada asal dana dari luar. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah tingkat keterikatan daerah pada pihak eksternal

2.2.1.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan perolehan dari sumber PAD sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Dalam penghitungannya, dilakukan komparasi antara pendapatan PAD yang direncanakan dengan yang berhasil direalisasikan. Ketika rasio kinerja PAD tinggi, menunjukkan jika pemerintah daerah sudah berhasil mencapai sasaran pendapatan PAD yang sudah direncanakan yang dulu (Mahmudi, 2012).

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran tentang sejauh mana kapabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan penerimaan PAD yang telah disusun, sesuai dengan sasaran yang ditentukan menurut bakat riil daerah. Semakin tinggi rasio kinerja ini, semakin baik keahlian daerah dalam meraih sasaran penerimaan PAD (Halim, 2007).

2.2.1.5 Rasio Efektivitas Pajak

Pajak ialah elemen kunci dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut definisi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah ialah sumbangan yang harus dibayar oleh individu dan perusahaan kepada daerah tanpa mendapat balasan langsung yang setara. Pajak daerah dikenakan menurut peraturan yang ada dan dipakai untuk mendukung kegiatan pemerintahan serta perkembangan di daerah. Rasio ini mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah bisa mengatur proses pengumpulan pajak daerah sejalan dengan target perolehan pajak.

Rasio efektivitas pajak daerah bermanfaat sebagai alat evaluasi untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah dalam menyusun pajak sejalan dengan target perolehan pajak yang sudah ditetapkan (Mahmudi, 2012).

2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal ialah bagian dari belanja langsung yang dipakai untuk mendanai kebutuhan investasi. Pengeluaran ini memiliki manfaat yang berlangsung lebih dari satu tahun budget dan bisa memperluas aset pemerintah, yang pada gilirannya menaikkan biaya pengelolaan (Mardiasmo, 2004). Secara umum, belanja modal didistribusikan untuk sarana dan prasarana publik, dalam bentuk aset tetap seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Pengeluaran ini bertujuan untuk mendukung penerapan tugas pemerintahan serta menyediakan fasilitas untuk umum (Darwanto & Yustikasari, 2007).

Belanja modal ialah pengeluaran yang dijalankan untuk penyusunan modal yang memperluas aset tetap/inventaris dengan manfaat yang berlangsung lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini mencakup biaya perawatan yang bertujuan untuk menahan atau memperpanjang masa pakai, serta menaikkan kekuatan dan mutu aset (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah/SAP). Dalam SAP, belanja modal dikelompokkan ke dalam 5 kelompok utama: belanja modal untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

Belanja modal sangat vital untuk menaikkan fasilitas publik, yang menyokong perkembangan ekonomi. Semakin tinggi tingkat investasi modal, diinginkan bisa menaikkan standar layanan publik dan partisipasi publik dalam pembangunan (Mardiasmo, 2002). Perkembangan aset dan fasilitas oleh pemerintah daerah berdampak positif pada perkembangan ekonomi (Kuncoro, 2006). Kenaikan pelayanan bidang umum secara konsisten akan menaikkan sarana dan penguat publik, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penunjang lainnya. Perkembangan ekonomi memerlukan tingkat investasi yang sebanding dengan pertumbuhan populasi, meliputi semua pengeluaran yang meningkatkan keefektifan (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur oleh pemerintah daerah diinginkan dapat mendorong kemajuan ekonomi daerah (Harianto & Adi, 2007). Daniel (2014) menentukan jika alokasi belanja daerah yang tepat berdampak positif pada daya saing, menunjukkan bahwa semakin tinggi penyaluran belanja modal, peningkatan daya saing wilayah.

Mengacu pada Rostow dan Musgrave pada (Mangkoesoebroto, 1997), model pengeluaran modal pemerintah terbagi menjadi tiga fase: fase awal, fase menengah, dan fase lanjut. Pada fase awal perkembangan ekonomi, persentase modal pemerintah pada total modal sangat besar karena pemerintah perlu menyajikan infrastruktur macam pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Di fase menengah pengembangan ekonomi, investasi pemerintah masih dibutuhkan untuk mendorong pengembangan ekonomi

agar bisa mencapai tingkat tinggal landas, meskipun pada fase ini peran investasi swasta sudah semakin signifikan. Pada fase ekonomi yang lebih maju, Rostow menjabarkan jika fokus kegiatan ekonomi pemerintah pindah dari penyajian infrastruktur ke pengeluaran untuk kegiatan sosial, seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan lain-lain.

Mengacu pada Suparmoko (2000), pengeluaran atau belanja pemerintah dapat disusun sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang berfungsi sebagai modal yang meningkatkan stabilitas dan ketangguhan ekonomi di masa depan.
2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada masyarakat.
3. Pengeluaran yang berkontribusi pada penghematan pengeluaran di masa depan.
4. Pengeluaran yang menciptakan lebih banyak peluang kerja dan mendistribusikan daya beli secara lebih luas.

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia ialah ukuran yang dipakai untuk menilai kemajuan suatu negara dalam hal perkembangan manusia. Indeks Perkembangan Manusia menilai tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu:

- a. Harapan hidup, yang dinilai dengan angka impian hidup pada saat kelahiran.

- b. Pendidikan, yang dinilai dengan rata-rata tingkat melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, dan tingkat pendaftaran dan kelulusan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- c. Standar hidup, yang dinilai dengan konsumsi perkapita.

Rentang nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah antara 0 hingga 100. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi menunjukkan bahwa suatu negara telah mencapai kemajuan yang lebih besar dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia memberikan gambaran holistik tentang tiga dimensi pembangunan manusia. Dimensi harapan hidup mengukur kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dimensi pendidikan mengukur akses dan kualitas pendidikan. Dimensi standar hidup mengukur kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Indeks perkembangan Manusia adalah alat penting untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dan untuk membandingkan kemajuan antar negara. IPM dapat dipakai untuk memonitor progres pembangunan manusia secara periodik, untuk menilai dampak kebijakan pembangunan, dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan (UNDP, 1993).

Indeks Pembangunan Manusia telah menjadi salah satu acuan pembangunan manusia yang paling banyak digunakan di dunia. Indeks Pembangunan Manusia dipakai untuk mengkomparasikan tingkat perkembangan manusia antar negara dan antar wilayah dalam suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia juga dipakai untuk menilai kemajuan dalam pembangunan manusia secara teratur.

Umunya teknik kalkulasi Indeks Perkembangan Manusia yang dipakai di Indonesia sama dengan teknik kalkulasi yang dipakai oleh UNDP. Indeks Perkembangan Manusia di Indonesia dirancang menurut tiga bagian indeks, yaitu:

- a. Indeks angka impian hidup ketika lahir.
- b. Indeks pendidikan, yang dinilai menurut rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf latin atau lainnya pada total penduduk usia 15 tahun atau lebih.
- c. Indeks standar hidup layak, yang dinilai dengan pengeluaran per kapita (PPP-Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah).

Indeks Perkembangan Manusia ialah rata-rata dari ketiga bagian tersebut, dengan rumus:

$$\text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM)} = (X1+X2+X3)/3$$

Dimana:

X1 = Angka impian hidup

X2 = Tingkat pendidikan

X3= Tingkat kehidupan yang layak

2.3 Literature Review Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
1.	Christy & Adi (2009)	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM, sedangkan variabel independennya adalah belanja modal dan DAU. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jawa Tengah, mencakup 29 kabupaten dan 6 kota. Teknik analisis data yang digunakan adalah inferensi statistik dengan metode regresi sederhana.	DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, dan belanja modal berdampak pada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi belanja modal akan mempengaruhi pengalokasian dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui tingkat IPM.
2.	Batafor (2011)	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM, sementara variabel independennya meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara periode I dan periode II untuk setiap variabel penelitian.	Peningkatan kinerja keuangan daerah, yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja, menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM.
3.	Mirza (2012)	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM, sedangkan variabel independennya adalah pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS Jawa Tengah, khususnya dari tahun 2006 hingga 2009. Penelitian ini menggunakan data panel, yang menggabungkan data time series dari tahun 2006-2009 dan data cross section dari 35 kabupaten/kota di Jawa	Perkembangan IPM menunjukkan peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode 2006-2009, hingga mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil regresi panel menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
		Tengah. Berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman, model yang dipilih adalah fixed effect.	
4.	Titin (2012)	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM, sedangkan variabel independennya adalah alokasi belanja langsung. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data realisasi belanja langsung pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik inferensial dengan metode regresi sederhana.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung tidak dapat memprediksi IPM.
5.	Setyowati & Suparwati (2012)	Variabel yang menjadi fokus penelitian adalah IPM, dengan variabel independen meliputi pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, dan PAD. Penelitian ini mengamati pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sample.	Pengeluaran publik (PE) tidak terbukti memiliki dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengalokasian anggaran belanja modal (PABM). Namun, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memiliki dampak positif terhadap IPM melalui PABM. Selain itu, PABM sendiri juga terbukti memiliki dampak positif terhadap IPM.
6.	Hendri & Yafiza (2020)	Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah IPM, dengan variabel independennya meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efektivitas pajak daerah. Penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efektivitas pajak daerah, yang secara bersamaan berdampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
		dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif, uji normalitas, dan identifikasi determinan.	
7.	Evlyn & Rahayu (2018)	Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah IPM, dengan variabel independennya meliputi tingkat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Penelitian ini mengamati populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi memiliki dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sementara rasio kemandirian keuangan daerah memiliki dampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun, rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
8.	Harliyani & Haryadi (2016)	Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah IPM, dengan variabel independennya meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi PAD, dan keserasian belanja langsung. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi selama periode 2001-2014.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi, sementara pada tingkat ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi PAD di Provinsi Jambi, tidak memiliki dampak signifikan terhadap IPM di wilayah tersebut.
9.	Sari & Supadmi (2016)	Variabel yang menjadi fokus penelitian adalah IPM, dengan variabel independennya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Biro Keuangan Provinsi Bali dalam bentuk Laporan Realisasi APBD tahun 2009-2013, serta data IPM tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara positif dan signifikan mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali selama periode 2008-2013. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD, semakin tinggi juga peningkatan IPM. Demikian pula, belanja modal juga memiliki dampak positif dan signifikan

No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
		2008-2013 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.	terhadap peningkatan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Artinya, semakin tinggi belanja modal, semakin tinggi juga peningkatan IPM.
10	Purbadharmaja & Amalia (2014)	Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah IPM, dengan variabel independennya meliputi kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali untuk periode 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan meliputi rasio keuangan untuk mengevaluasi kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja, serta regresi linier berganda.	Secara bersamaan, kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja memiliki dampak yang signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2008-2012. Secara parsial, kemandirian keuangan daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode tersebut. Demikian pula, keserasian alokasi belanja juga memiliki dampak positif dan signifikan secara parsial terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode yang sama.
11	Verawaty & Salwa (2023)	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal. Variabel independen meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), SiLPA, Kemiskinan, dan Pengangguran. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, yang mencakup 17 kabupaten/kota, dengan data sekunder diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan DJPK Departemen Keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPM, sedangkan DAU memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. DAK, meskipun signifikan positif terhadap belanja modal, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Selain itu, belanja modal tidak mengintervensi pengaruh DAK terhadap IPM, berdasarkan hasil uji sobel yang menunjukkan nilai z hitung lebih kecil dari z tabel. Ini mengindikasikan bahwa alokasi DAK yang tinggi tidak serta-merta meningkatkan IPM di Provinsi Sumatera Selatan.

No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
12	Wulandari <i>et al.</i> (2018)	<p>Dalam penelitian ini, variabel dependen yang dianalisis adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan variabel independennya meliputi surplus/ defisit anggaran dan pendapatan lain-lain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik inferensial, khususnya metode regresi sederhana, untuk mengevaluasi pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap IPM melalui belanja modal.</p>	<p>Hasil empiris menunjukkan bahwa surplus/defisit anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM secara langsung, serta secara tidak langsung melalui belanja modal. Ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa surplus/defisit anggaran berdampak pada IPM, baik secara langsung maupun melalui pengeluaran modal. Temuan ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Adiputra, Dwiyantari, dan Darmada (2015) yang tidak menemukan pengaruh signifikan dari surplus/defisit anggaran terhadap IPM. Selain itu, pendapatan lain-lain juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa baik surplus/defisit anggaran maupun pendapatan lain-lain memainkan peran penting dalam menentukan tingkat IPM, baik melalui jalur langsung maupun melalui pengaruhnya terhadap belanja modal.</p>
13	Pratama & Kartika (2017)	<p>Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis), yang diolah menggunakan program SPSS, untuk memahami bagaimana PAD dan SiLPA mempengaruhi IPM secara langsung maupun tidak</p>	<p>Hasil empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan SiLPA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal, dan pada akhirnya, Belanja Modal juga berpengaruh positif terhadap IPM. Ini menunjukkan bahwa semakin besar alokasi PAD dan SiLPA, maka akan semakin besar pula Belanja Modal yang kemudian berdampak pada peningkatan IPM. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif terhadap PAD dan SiLPA sangat penting untuk meningkatkan</p>

No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
		langsung melalui Belanja Modal.	kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Teori agensi mengatakan jika interaksi antara prinsipal (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah) adalah kunci untuk memahami dinamika pengelolaan sumber daya dan implementasi kebijakan. Pemerintah pusat, sebagai prinsipal, memiliki kontrol yang signifikan atas alokasi sumber daya dan kebijakan nasional, termasuk pembangunan manusia. Di sisi lain, pemerintah daerah bertindak sebagai agen dengan otonomi lokal yang berpotensi bertentangan dengan prioritas nasional. Konflik kepentingan muncul karena pemerintah pusat mungkin lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi sementara pemerintah daerah mungkin lebih peduli terhadap kesejahteraan lokal. Pengaruh rasio derajat desentralisasi kemudian menjadi penting karena semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar kekuasaan dan tanggung jawab yang dipindahkan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi yang tepat dapat meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan lokal, menaikkan jangkauan dan kualitas layanan masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, serta menaikkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Mengacu pada Mahmudi (2012), Derajat Desentralisasi mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendanai pengembangan. Lewat penggunaan rasio derajat

desentralisasi, bisa diidentifikasi sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan desentralisasi dengan menaikkan PAD. Semakin tinggi PAD yang berhasil dihimpun, semakin besar juga dana yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Ketika layanan publik tercapai secara optimal, diinginkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Studi yang dikerjakan oleh Setyowati & Suparwati (2012) menyatakan Jika PAD mempunyai dampak positif pada IPM. Hasil ini disokong oleh studi Anggraini (2015) yang menyimpulkan jika rasio derajat desentralisasi memberikan dampak positif yang penting pada IPM. Mengacu data empiris dan tinjauan teori, hipotesis studi disusun sebagai berikut:

H1: Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.4.2 Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Teori agensi mengatakan jika interaksi antara atasan (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah) sering kali diwarnai oleh masalah alokasi sumber daya dan insentif yang berbeda. Dalam kerangka teori agensi, ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pusat dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lewat beberapa mekanisme. Tingkat ketergantungan yang tinggi akan mengurangi ketersediaan dana untuk investasi dalam infrastruktur sosial kunci, seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak negatif pada IPM. Selain itu,

ketergantungan keuangan yang tinggi dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya secara optimal, yang juga dapat memengaruhi IPM. Selain itu, interaksi agensi antara pemerintah pusat dan daerah bisa menyebabkan ketegangan dalam kebijakan yang mempengaruhi IPM, dengan pemerintah pusat berupaya memastikan penggunaan transfer pusat sesuai dengan kepentingan nasional.

Rasio keterikatan keuangan daerah memperbandingkan perolehan transfer dengan jumlah pemasukan yang dicapai oleh suatu daerah, bertujuan untuk menilai sejauh mana keterikatan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasio keterikatan keuangan daerah, semakin besar tingkat keterikatan pemerintah daerah pada pemerintah pusat (Mahmudi, 2012). Jika pemerintah daerah mempunyai keterikatan yang rendah pada pemerintah pusat, dapat dianggap jika kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut baik. Dengan demikian, pelaksanaan penyediaan layanan publik dapat optimal, yang pada gilirannya bisa menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Studi yang dikerjakan oleh Ardiansyah & Widiyaningsih (2014) mengkaji apakah Dana Alokasi Umum (DAU), sebagai bagian dari perolehan transfer, berdampak pada IPM. Hasil studi tersebut mengatakan jika DAU memiliki pengaruh negatif yang tidak penting pada IPM. Anggraini (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perolehan transfer tidak memengaruhi pengadaan publik karena perolehan transfer dipakai untuk menutup biaya operasional yang tidak dapat terpenuhi hanya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, jika pengadaan publik tidak memiliki pengaruh, hal

yang sama berlaku pada IPM. IPM yang dinilai melalui penyediaan publik juga tidak akan terdampak oleh perolehan transfer. Merujuk analisis empiris dan kajian teoritis, disusun asumsi studi sebagai berikut:

H2: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.4.3 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Teori agensi mengatakan jika interaksi antara pihak yang memberikan hak (prinsipal) dan pihak yang menerima hak (agen) dapat mempengaruhi kinerja dan hasil yang dicapai. Dalam konteks ini, pemerintah pusat berperan sebagai atasan, sementara pemerintah daerah berperan sebagai agen. Dalam kerangka teori agensi, dampak rasio kemandirian keuangan daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan melalui dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah mengtaksir seberapa besar pemerintah daerah dapat mengandalkan pendapatan lokalnya sendiri tanpa terlalu tergantung pada transfer pusat. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi bisa meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk investasi dalam bagian kunci seperti pendidikan dan kesehatan yang berkontribusi pada peningkatan IPM.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu secara mandiri membiayai kegiatan di wilayahnya. Rasio ini dapat

mengindikasikan tingkat keterikatan daerah pada sumber daya eksternal. Tingkat kemandirian tiap daerah dapat bervariasi, tergantung pada ketersediaan sumber daya di daerah tersebut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, semakin besar potensi pemerintah daerah untuk menyajikan layanan publik yang optimal, yang pada gilirannya dapat mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Mahmudi, 2012).

Purbadharmaja & Amalia (2014) dalam penelitian mereka menyatakan jika rasio kemandirian keuangan daerah berdampak secara penting pada IPM. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Dewi & Sutrisna (2014) dalam penelitian mereka. Lewat bukti empiris dan analisis teoritis, hipotesis studi disusun seperti berikut:

H3: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.4.4 Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori agensi menyatakan jika interaksi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali dipengaruhi oleh masalah informasi asimetris dan konflik kepentingan, yang dapat mempengaruhi efektivitas alokasi sumber daya publik. Dalam kerangka teori agensi, dampak rasio kinerja perolehan asli daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat melalui dinamika interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Rasio kinerja perolehan asli daerah mengukur sejauh mana perolehan asli daerah dapat digunakan secara efektif untuk membiayai program-program pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tingkat

efektivitas yang tinggi mungkin memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat sejalan dengan kebutuhan lokal, yang dapat berkontribusi pada peningkatan IPM.

Tingginya pendapatan pemerintah tidak selalu mencerminkan keberhasilan pembangunan yang baik di suatu daerah. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya perolehan daerah, melainkan juga pada manajemen dan pengelolaannya yang menjadi faktor krusial.

Ardiansyah & Widiyaningsih (2014) dalam studinya menyatakan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setyowati & Suparwati (2012) juga mengungkapkan bahwa PAD berdampak secara signifikan pada PAD itu sendiri. Rasio efektivitas PAD yang tinggi mencerminkan bahwa pemerintah daerah sudah berhasil mencapai target penerimaan PAD yang sudah disediakan dulu. Adanya perolehan yang memadai diinginkan bisa diatur dengan efektif oleh pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang optimal. Lewat bukti empiris dan analisis teoritis, hipotesis studi disusun seperti berikut:

H4: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.4.5 Pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Teori agensi mengatakan jika dalam interaksi antara pemberi tugas (prinsipal) dan pelaksana (agen), terdapat potensi ketidaksesuaian kepentingan

yang bisa menyebabkan performa dan hasil yang didapat. Dalam kerangka teori agensi, dampak rasio kinerja pajak daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan melalui dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Rasio efektivitas pajak daerah menilai seberapa baik pemerintah daerah dapat menerima pajak dari sumber-sumber lokal untuk mendanai program-program pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tingkat efektivitas yang tinggi dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan IPM.

Pajak ialah salah satu elemen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio kinerja pajak daerah digunakan untuk menilai kapabilitas pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sejalan dengan target perolehan pajak yang telah ditetapkan. Pungutan pajak yang berhasil dan efisien diinginkan bisa meningkatkan pendapatan daerah, yang selanjutnya dapat dipakai untuk mengoptimalkan atau memenuhi kebutuhan perkembangan fasilitas publik di wilayah tersebut.

Davoodi & Zou (1998) menyatakan bahwa Average Tax Rate memiliki pengaruh positif yang penting pada Per Capita Output Rate, yang kemudian menjadi dasar untuk meningkatkan Human Development Index. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penyajian layanan publik yang optimal diinginkan bisa menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu ukuran capaian pemerintah di daerah. Dalam konteks ini, kontribusi aktif masyarakat dianggap krusial, di mana mereka diharapkan berkontribusi melalui pembayaran

pajak untuk mendukung pembangunan daerah. Lewat bukti empiris dan analisis teoritis, hipotesis studi disusun seperti berikut:

H5: Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.4.6 Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Dimoderasi Alokasi Belanja Modal

Teori agensi mengatakan jika interaksi antara atasan (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah) melibatkan transfer kekuasaan dan tanggung jawab, yang harus diatur dengan baik agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kerangka teori agensi, dampak rasio derajat desentralisasi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dimoderasi oleh variabel pemoderasi, yaitu alokasi belanja modal. Rasio derajat desentralisasi mengukur sejauh mana kekuasaan dan tanggung jawab dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sementara belanja modal ialah pengeluaran untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik. Variabel ini menjadi penting karena dapat memoderasi hubungan antara desentralisasi dan pembangunan manusia. Teori agensi mengemukakan bahwa dengan desentralisasi yang lebih tinggi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kontrol atas alokasi belanja modal untuk proyek-proyek infrastruktur yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Jika alokasi belanja modal dilakukan secara efektif, meningkatnya desentralisasi dapat memungkinkan

pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan lokal dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan IPM.

Rasio derajat desentralisasi mengukur seberapa efektif pemerintah daerah dalam menerapkan desentralisasi dengan cara menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD yang didapat, semakin besar kebebasan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran, terutama dalam belanja modal yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini dapat menaikkan daya beli masyarakat pada berbagai jenis barang, baik makanan maupun non-makanan.

Sari & Supadmi (2016) menemukan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak positif dan penting pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setyowati & Suparwati (2012), di hasil studi, menunjukkan jika PAD memiliki dampak positif pada IPM lewat penyaluran belanja modal. Lewat bukti empiris dan analisis teoritis, asumsi studi disusun seperti berikut:

H6: Alokasi Belanja Modal Memperkuat Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap IPM

2.4.7 Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Dimoderasi Alokasi Belanja Modal

Teori agensi menyatakan bahwa ada interaksi antara pihak yang memberikan hak (kepala) dan pihak yang menerima hak untuk menjalankan tugas (agen). Dalam konteks pemerintahan, pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal

yang memberikan wewenang dan sumber daya kepada pemerintah daerah sebagai agen. Dampak rasio kebergantungan keuangan daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dimoderasi oleh variabel pemoderasi, yaitu alokasi belanja modal. Rasio ketergantungan keuangan daerah menilai sejauh mana pemerintah daerah mengharapkan perolehan transfer dari pemerintah pusat, sedangkan alokasi belanja modal merujuk pada pengeluaran untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik. Dalam teori agensi, ketergantungan keuangan yang tinggi dapat membatasi otonomi dan fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk bagian kunci pembangunan manusia macam pendidikan dan kesehatan. Namun, peran alokasi belanja modal dapat memoderasi hubungan ini. Jika penyaluran belanja modal dikerjakan secara efektif, pemerintah daerah masih dapat mengalokasikan sumber daya secara strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, bahkan dengan keterbatasan dana yang berasal dari transfer pusat.

Rasio keterikatan keuangan daerah mengkomparasikan perolehan transfer dengan total perolehan yang diterima oleh suatu daerah. Rasio ini bertujuan untuk menilai seberapa banyak pemerintah kabupaten/kota bergantung pada pemerintah provinsi dan pusat. Kian rendah rasio kebergantungan keuangan daerah, semakin besar kemandirian pemerintah daerah dalam menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk investasi publik, seperti perkembangan Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah yang membutuhkan tambahan ruang belajar dan penyediaan puskesmas pembantu (pustu) beserta fasilitasnya untuk mencakup daerah terjauh atau dengan tingkat impian hidup yang rendah.

Mengacu pada Halim (2007), pentingnya mengurangi keterikatan pada bantuan pusat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai asal utama keuangan, dengan dukungan aturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Syamsi (1986), seperti yang dikutip dalam Saftiana & Susantih (2009), menggambarkan capaian keuangan pemerintah daerah sebagai kapabilitas untuk mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana tersebut. Menurut Alexiou (2009) dan Evelyn & Rahayu (2018), pengeluaran pemerintah untuk investasi publik memiliki efek positif yang penting pada kesejahteraan masyarakat. Penyajian jaringan seperti jaringan jalan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan diinginkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kecerdasan masyarakat. Belanja modal daerah, macam pembangunan gedung sekolah dan infrastruktur pendidikan lainnya, dipandang sebagai faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas perkembangan manusia (Christy & Adi, 2009). Mengacu pada kajian teoritis, asumsi studi ditetapkan sebagai berikut:

H7: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap IPM

2.4.8 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Dimoderasi Alokasi Belanja Modal

Teori agensi mengatakan jika dalam interaksi antara pemilik (atasan) dan pengelola (agen), terdapat potensi konflik kepentingan dan masalah informasi yang tidak seimbang. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah pusat bertugas sebagai atasan, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Dampak rasio kemandirian keuangan daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dianalisis melalui kerangka teori ini dengan mempertimbangkan penyaluran belanja modal sebagai variabel pemoderasi. Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mengharapkan perolehan asli daerah (PAD) dikomparasikan dengan perolehan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Dalam teori agensi, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin besar kontrol yang dimiliki pemerintah daerah atas sumber dayanya sendiri, sehingga mereka lebih mampu merespons kebutuhan lokal secara efektif. Ini berarti bahwa dengan lebih banyak kemandirian keuangan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana dengan lebih fleksibel dan tepat sasaran untuk program-program pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan IPM dapat dipengaruhi oleh efektivitas penyaluran belanja modal. Jika penyaluran belanja modal dikerjakan secara efektif, peningkatan kemandirian keuangan daerah dapat lebih berkontribusi pada peningkatan IPM, karena dana tersebut

digunakan untuk investasi yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan seberapa besar suatu daerah mampu untuk secara mandiri mendanai aktivitas yang dilakukan di wilayahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan mengkomparasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total perolehan yang didapat dari perolehan transfer dan pinjaman daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin besar fleksibilitas pemerintah daerah dalam memakai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk investasi publik di bagian seperti pendidikan dan kesehatan. Contoh kegiatan yang bisa didanai termasuk pengadaan perangkat laptop atau komputer untuk laboratorium sekolah, serta penyediaan sarana transportasi air untuk layanan kesehatan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan perjalanan darat menuju pusat kota. Desentralisasi fiskal, pada dasarnya, terkait dengan dua aspek utama: kemandirian daerah dalam menentukan pengeluaran untuk melaksanakan layanan publik dan pembangunan, serta kemandirian daerah dalam mendapatkan perolehan untuk mendanai pengeluaran tersebut (Muluk, 2005).

Menurut hasil penelitian dari Setyowati & Suparwati (2012), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), ialah bagian dari pemasukan transfer dari pemerintah pusat, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbukti memiliki dampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lewat penyaluran belanja modal. Dengan dasar bukti empiris dan kajian teori, hipotesis studi disusun sebagai berikut:

H8: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM

2.4.9 Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Dimoderasi Alokasi Belanja Modal

Teori agensi mengatakan jika dalam interaksi antara atasan (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah), terdapat potensi konflik kepentingan dan masalah pengelolaan yang dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Dampak rasio kinerja perolehan asli daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dipengaruhi oleh variabel pemoderasi, yaitu penyaluran belanja modal. Rasio kinerja perolehan asli daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan dari sumber-sumber lokal yang tersedia. Alokasi belanja modal, di sisi lain, merujuk pada pengeluaran untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik. Dalam konteks ini, teori agensi menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas perolehan asli daerah, semakin besar pula sumber daya yang bisa disalurkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung program-program pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, efektivitas hubungan ini dapat dipengaruhi oleh bagaimana penyaluran belanja modal dilakukan. Jika penyaluran belanja modal dilakukan secara efektif, peningkatan efektivitas pendapatan asli daerah dapat lebih berkontribusi pada peningkatan IPM karena dana yang terkumpul digunakan untuk investasi yang produktif.

Rasio kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah dalam menggalang penerimaan PAD selaras dengan target yang telah ditetapkan. Jika pemerintah daerah berhasil secara tepat mewujudkan pencapaian PAD sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan, maka pemerintah daerah akan mempunyai fleksibilitas dalam memakai sumber daya keuangan tersebut untuk mewujudkan belanja modal atau investasi publik yang menyokong aspek perkembangan manusia di wilayahnya, seperti perkembangan infrastruktur sekolah, pengadaan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan penyediaan peralatan laboratorium di sekolah selaras keperluan. Penggunaan belanja modal atau investasi publik tersebut dapat diterapkan dengan perolehan sasaran PAD tanpa bergantung pada realisasi pendapatan daerah dari pemerintah pusat atau provinsi.

Dalam penelitiannya, Setyowati & Suparwati (2012) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lewat penyaluran belanja modal. Purbadharmaja & Amalia (2014) dalam hasil studinya menegaskan jika kemandirian keuangan daerah yang tercermin dalam PAD dan keselarasan penyaluran belanja untuk ambisi publik secara bersamaan berdampak penting pada IPM. Dengan dasar bukti empiris dan kajian teori, hipotesis studi disusun sebagai berikut:

H9: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap IPM

2.4.10 Pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Dimoderasi Alokasi Belanja Modal

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat hubungan antara prinsipil (pemilik atau masyarakat) dan agen (pemerintah atau pengelola) yang dapat menyebabkan masalah keagenan jika kepentingan kedua belah pihak tidak selaras. Agen diharapkan bertindak demi kepentingan prinsipil, namun seringkali agen memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipil, yang dapat menimbulkan asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan. Dalam konteks dampak rasio kinerja pajak daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), teori agensi menunjukkan bagaimana alokasi belanja modal dapat menjadi variabel pemoderasi. Rasio kinerja pajak daerah menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pajak dari penduduk setempat secara efisien dan tepat waktu. Alokasi belanja modal, di sisi lain, merujuk pada pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik.

Pajak merupakan komponen integral dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio kinerja pajak daerah merupakan alat untuk menilai kapabilitas pemerintah daerah dalam menghimpun pajak selaras dengan target perolehan pajak yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan efisiensi dalam pemungutan pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, yang kemudian dapat dipakai untuk memperluas atau memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum di daerah tersebut. Konsep agensi mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas pajak daerah, semakin besar sumber daya yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah

untuk mendukung pembangunan manusia, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

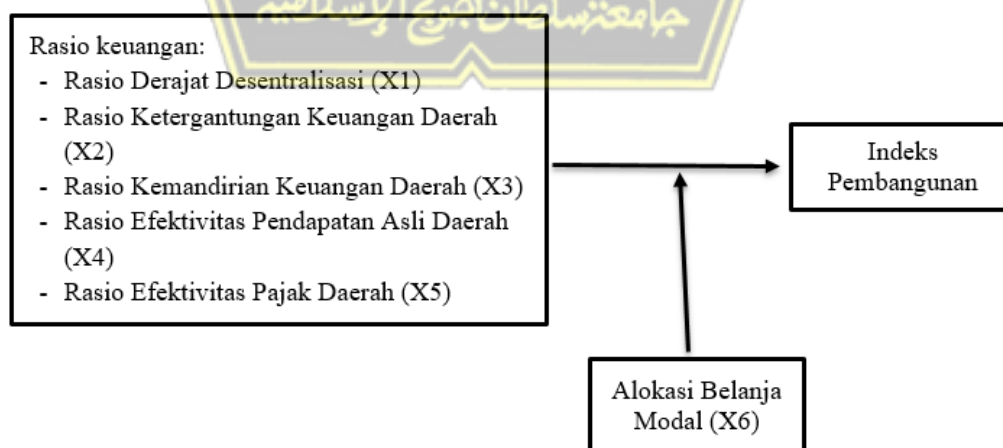
Dalam penelitiannya, Davoodi & Zou (1998) menunjukkan bahwa Average Tax Rate memiliki dampak positif yang penting pada Tingkat Output Per Kapita, yang menjadi fondasi untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan dasar bukti empiris dan kajian teori, hipotesis studi disusun sebagai berikut:

H10: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio efektivitas pajak daerah terhadap IPM

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka konseptual ini dituju sebagai konsep untuk dapat menjabarkan, menyampaikan, dan mengatakan relasi antara variabel-variabel yang dapat dikaji. Untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang lebih jelas, skema konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe studi yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian kuantitatif. Dalam studi kuantitatif, informasi dikumpulkan dalam bentuk angka maupun data yang berupa kalimat yang disesuaikan menjadi data yang berbentuk angka. Dalam studi kuantitatif, teknik yang dipakai adalah untuk mengkaji populasi dan sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel melalui *random sampling*. Data dikumpulkan memakai instrumen studi, dan analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik untuk menguji asumsi yang telah ada (Sugiyono, 2019). Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi dampak rasio keuangan pemerintah daerah pada Indeks Pembangunan Manusia dengan penyaluran belanja modal sebagai variabel moderasi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi ialah keseluruhan obyek studi, baik yang berupa benda nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala yang ialah sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sugiyono, 2019). Populasi pada studi ini ialah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.2.2 Sampel

Sampel ialah sejumlah kecil anggota populasi yang didapat dengan teknik tertentu untuk mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2019). Sampel studi ini didapat memakai purposive sampling dengan standar pemilihan sampel yaitu:

- Pemerintah kabupaten/kota se- Jawa tengah tahun 2021-2023 yang mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan di audit.
- Pemerintah kabupaten/kota se- Jawa tengah tahun 2021-2023 yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Pemerintah kabupaten/kota se- Jawa tengah tahun 2021-2023 yang menyuguhkan data keuangan untuk dipakai dalam kalkulasi rasio.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam studi ini ialah data sekunder, yang didapat analis secara tidak langsung lewat mediator, seperti bukti atau laporan historis yang sudah tersimpan dalam arsip, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum (Sekaran, 2006). Data yang akan dikaji dalam studi ini didapat melalui publikasi data Indeks Pembangunan Manusia pada website Badan Pusat Statistik dan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada studi ini memakai data sekunder pada tahun 2021-2023 yang didapat dari beragam sumber sebagai berikut:

IPM : Badan Pusat Statistik (BPS)

LKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam studi ini ialah teknik dokumentasi, yaitu dengan mengakses dokumen tertulis seperti arsip, buku, pendapat ahli, teori, serta data dari dinas terkait yang berkaitan dengan topik studi. Data yang dibutuhkan meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rasio keuangan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2021-2023.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen ialah jenis variabel yang diterangkan oleh variabel independen. Dalam konteks studi ini, variabel dependen ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah suatu ukuran yang dipakai untuk mengkaji kemajuan suatu negara atau daerah dalam hal kesejahteraan manusia. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Faktor-faktor seperti harapan hidup, angka melek huruf, dan pemasukan per kapita sering dijadikan penanda untuk menghitung IPM. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak sepenuhnya kepada setiap daerah untuk menata dan menangani urusan rumah

tangganya, yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Pemberlakuan otonomi daerah diinginkan dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan, sehingga dapat diasumsikan bahwa salah satu parameter perkembangan, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga diasumsikan akan mengalami peningkatan.

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen, atau yang juga dikenal sebagai variabel bebas, ialah jenis variabel yang mempunyai dampak evolusi pada variabel terikat. Dalam kondisi studi ini, variabel independen mencakup dari sejumlah rasio keuangan daerah, yaitu:

3.5.2.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi merujuk pada kapabilitas pemerintah daerah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah guna mendanai perkembangan. Hal ini bisa dipakai sebagai indikator untuk menilai tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2012). Teori dan pengukuran.

Perhitungan Derajat Desentralisasi didasarkan pada komparasi antara jumlah Perolehan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini mencerminkan andil Perolehan Asli Daerah pada total penerimaan daerah. Menilai tingkat otonomi fiskal dengan memperhitungkan persentase Perolehan Asli Daerah pada total perolehan daerah (Munir, 2004). Semakin besar andil Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi kapabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.5.2.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu pemerintah provinsi mengandalkan perolehan transfer dari pemerintah pusat. Secara umum, andil terbesar perolehan transfer berasal dari dana perimbangan, seperti dana penyaluran umum, yang bertujuan untuk meratakan kapabilitas keuangan daerah (Mahmudi, 2012).

Perhitungan rasio keterikatan keuangan daerah melibatkan perbandingan antara jumlah perolehan transfer yang didapat oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat keterikatan pemerintah daerah pada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.5.2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana kebergantungan keuangan daerah pada asal pendanaan dari luar. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian keuangan daerah, semakin rendah keterikatan pemerintah provinsi pada pemerintah pusat, dan sebaliknya (Mahmudi, 2012).

Mengacu pada Halim (2007), rasio kemandirian mencerminkan tingkat keterikatan daerah pada asal dana eksternal. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian menandakan tingkat keterikatan daerah pada pihak luar yang semakin

berkurang. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan komparasi total perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perolehan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini menandakan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{transfer provinsi}} \times 100\%$$

3.5.2.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam menggalang penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam rasio ini, terjadi komparasi antara jumlah PAD yang direncanakan dengan PAD yang berhasil direalisasikan. Tingkat rasio kinerja PAD yang tinggi menunjukkan jika pemerintah daerah tersebut berhasil mencapai target penerimaan PAD yang telah ditentukan sebelumnya (Mahmudi, 2012).

Rasio efektivitas PAD mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD yang telah disusun sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan menurut kecakapan riil daerah. Semakin tinggi rasio kinerja ini, menandakan kapabilitas daerah yang semakin optimal (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3.5.2.5 Rasio Efektivitas Pajak

Rasio ini mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola proses pengumpulan pajak daerah selaras dengan target penerimaan pajak yang

telah ditetapkan. Pajak daerah merupakan kontribusi yang diwajibkan kepada daerah oleh individu dan perusahaan tanpa bantuan langsung yang setara, yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang tertera dan dipakai untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan perkembangan daerah.

Rasio kinerja pajak daerah digunakan untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak secara sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditetapkan (Mahmudi, 2012).

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

3.5.3 Variabel Pemoderasi

Variabel pemoderasi dalam studi ini ialah alokasi belanja modal, ialah pengeluaran yang dialokasikan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, dan rumah sakit. Penyaluran belanja modal dapat memoderasi interaksi antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks teori agensi, alokasi belanja modal dapat menjadi faktor penentu dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara efektivitas pajak daerah dan IPM. Misalnya, alokasi belanja modal yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas penggunaan pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan IPM. Sebaliknya, jika alokasi belanja modal rendah atau tidak efektif, maka dampak positif dari efektivitas pajak daerah terhadap IPM juga dapat terbatas. Oleh karena itu, variabel pemoderasi ini penting untuk dipertimbangkan dalam analisis terhadap interaksi antara variabel

independen dan dependen, karena dapat memengaruhi hasil penelitian dan implikasi kebijakan yang dihasilkan.

3.6 Alat Analisis

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif, yang umumnya bertujuan untuk mencapai generalisasi melalui pengujian statistik yang bebas dari efek subjektivitas analisis (Sekaran, 2006). Analisis yang dipakai dalam studi ini ialah regresi linier berganda.

Regresi linier berganda bisa diterapkan sesudah model studi ini mencapai asumsi klasik, yang meliputi data yang terdistribusi normal, bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan gambaran data yang meliputi mean, median, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari sampel. Analisis ini berguna untuk memahami pola distribusi dan perilaku data yang dipakai dalam studi.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi berganda dapat diterapkan untuk estimasi jika mencapai dugaan Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), yang mencakup normalitas data, serta bebas dari multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Untuk menguji kelayakan model ini, uji asumsi klasik perlu dilakukan.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah model regresi dan kedua variabel (independen dan dependen) mengikuti distribusi normal. Model regresi yang optimal ialah yang mempunyai distribusi normal. Untuk itu, uji normalitas dikerjakan memakai uji Kolmogorov-Smirnov dengan signifikansi 0,05.

Dasar pengambilan keputusan:

1. Bila Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
2. Bila Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada interaksi antar variabel bebas pada model regresi. Frisch mengemukakan bahwa multikolinieritas muncul apabila ada interaksi linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi, yang menyebabkan kesulitan dalam menjelaskan interaksi antara variabel penjelas dan variabel terjelas.

Variabel bebas yang saling berkorelasi berarti tidak ortogonal, karena variabel ortogonal memiliki nilai korelasi nol antar serupa variabel independen. Multikolinieritas dalam model regresi dapat terdeteksi jika R^2 dari auxiliary regression lebih besar daripada R^2 regresi keseluruhan antara variabel bebas dan tidak bebas. Pengujian multikolinieritas juga dapat dikerjakan dengan memeriksa nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang lebih besar dari 10 menandakan adanya potensi multikolinieritas (Ghozali, 2013).

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengidentifikasi adanya ketidaksamaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Heteroskedastisitas ialah kejadian di mana varians antar data tidak sama. Hal ini terjadi jika varian dari variabel tidak bebas (Y_i) naik bersamaan dengan kenaikan varian variabel bebas (X_i), yang menyebabkan variabel Y_i tidak homogen. Heteroskedastisitas lebih sering ditemukan pada data cross section dibandingkan time series. Model regresi yang diinginkan ialah yang bersifat homoskedastis, yaitu tidak menandakan heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada studi ini dikerjakan dengan memeriksa pola pada grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terkait dan residualnya. Jika titik-titik data pada grafik membagi di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi menandakan gejala heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk mengkaji apakah ada interaksi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ dalam model regresi linear. Autokorelasi merujuk pada korelasi antar elemen dalam urutan observasi yang disusun baik menurut maupun ruang. Autokorelasi lebih sering terjadi pada data time series. Dalam studi ini, uji Runs Test dipakai untuk menemukan adanya autokorelasi pada model regresi (Ghozali, 2013).

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Studi ini memakai model analisis regresi linear berganda. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai besar efek variabel independen pada variabel dependen, yaitu efek Rasio Keuangan Daerah Umum pada Indeks Pembangunan Manusia. Data akan diolah memakai perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) dan Microsoft Office Excel. Persamaan regresi yang dipakai dalam studi ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_1 X_6 + \beta_8 X_2 X_6 + \beta_9 X_3 X_6 + \beta_{10} X_4 X_6 + \beta_{11} X_5 X_6 + e$$

Keterangan:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- β_0 = Konstanta
- β = Koefisien Regresi (Nilai Peningkatan ataupun Penurunan)
- X1 = Rasio Derajat Desentralisasi
- X2 = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
- X3 = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- X4 = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
- X5 = Rasio Efektivitas Pajak Daerah
- X6 = Alokasi Belanja Modal
- e = error term

3.6.4 Pengujian Hipotesis

3.6.4.1 Uji koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) menunjukkan sejauh mana model mampu menjabarkan variasi variabel dependen. Semakin mendekati satu nilai R², semakin

besar peran variabel-variabel independen dalam menjabarkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.6.4.2 Uji Signifikansi t

Pengujian dugaan ini digunakan untuk menilai dampak dan signifikansi dari variabel dependen melalui uji signifikansi parameter individual, dengan kepastian 95% dan toleransi kesalahan analisis 5%.

Dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika $\text{Sig} \leq 0.05$ maka : H_a diterima

Jika $\text{Sig} \geq 0.05$ maka : H_a ditolak



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Sampel

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode tahun 2021-2023. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dan data IPM yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut rincian penyajian data:

Tabel 4. 1 Rincian Penyajian Data

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	35 Kabupaten/Kota
Periode penelitian	3 Tahun (2021-2023)
Total jumlah sampel	105
Data yang tidak memenuhi kriteria	0
Data yang dapat diolah	105
Persentase data yang dapat diolah	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Penelitian ini mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang berjumlah 35. Data dikumpulkan untuk periode penelitian selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Karena setiap kabupaten/kota memiliki data

selama tiga tahun, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 105 (35 Kabupaten/Kota \times 3 tahun).

Setelah melalui tahap verifikasi, seluruh data dari 105 sampel memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat diolah sepenuhnya dalam analisis ini. Dengan demikian, persentase data yang dapat diolah mencapai 100%, tanpa ada data yang tidak memenuhi kriteria atau perlu dikeluarkan dari analisis.

Tabel ini menunjukkan bahwa data yang diambil cukup representatif dan lengkap untuk menguji hipotesis penelitian mengenai hubungan antara rasio keuangan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan software SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) untuk menguji hipotesis dan menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Proses analisis data mencakup beberapa tahapan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, dan uji hipotesis.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam analisis statistik deskriptif, variabel studi dijelaskan dengan melihat jumlah data, nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi. Nilai minimum adalah nilai terendah dalam data, namun nilai maksimum ialah nilai tertinggi. Rata-rata dipakai untuk menentukan nilai pusat distribusi data, dan

simpangan baku mengukur sebaran data di sekitar nilai rata-rata. Hasil statistic deskriptif menggunakan SPSS pada penelitian ini disampaikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	105	66.32	84.99	73.5056	4.43078
X1	105	.10	.53	.2076	.07638
X2	105	.47	.88	.7754	.07579
X3	105	.11	1.00	.2470	.14190
X4	105	.81	2.51	1.1027	.19971
X5	105	.72	2.74	1.0754	.19472
X6 (milyar)	105	75.19	1089.36	305.7215	164.84467
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Mengacu Tabel 4.2 tersebut, bisa dijabarkan hasil statistic deskriptif sebagai berikut:

1. IPM dengan nilai terendah (*minmum*) adalah Kabupaten Brebes pada tahun 2021 sebesar 66,32 sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) yaitu Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 84,99 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk IPM sebesar 73,5056.

Rendahnya IPM di Kabupaten Brebes pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Brebes belum memperoleh pendidikan/ pengetahuan yang lebih baik, umur panjang dan hidup sehat, serta pendapatan untuk hidup yang layak bila dikomparasikan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tingginya IPM di Kota Salatiga pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk Kota Salatiga mempunyai bagian pendidikan/ pengetahuan yang lebih baik, pola hidup sehat, dan daya beli yang

lebih tinggi dikomparasikan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki rata-rata sebesar 73,5056. Nilai ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat IPM di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah cukup baik, namun tetap ada disparitas antara daerah dengan IPM yang lebih rendah seperti Kabupaten Brebes, dan daerah dengan IPM yang lebih tinggi seperti Kota Salatiga.

2. Derajat Desentralisasi (DD) dengan nilai rendah (*minimum*) adalah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 sebesar 0,10 sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 0,53 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk derajat desentralisasi sebesar 0,2076.

Rendahnya derajat desentralisasi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya lebih mengandalkan sumber pendanaan dari non PAD (pendapatan transfer dan pendapatan daerah lainnya) bila dikomparasikan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tingginya derajat desentralisasi di Kota Semarang pada tahun 2023 menunjukkan jika Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya lebih mengandalkan asal pendanaan yang berasal dari PAD bila dikomparasikan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Derajat Desentralisasi (DD) memiliki rata-rata 0,2076. Rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah masih cenderung bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan

belum sepenuhnya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan.

3. Ketergantungan Keuangan Daerah (TKD) dengan nilai terendah (*minum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 0,47 sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 sebesar 0,88 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk ketergantungan keuangan daerah sebesar 0,7754. Rendahnya ketergantungan keuangan daerah di Kota Semarang pada tahun 2023 menunjukkan jika Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya tidak mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer atau dana perimbangan bila dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tingginya ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya lebih mengandalkan asal pendanaan yang berasal dari perolehan transfer baik yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya bila dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Ketergantungan Keuangan Daerah (TKD) memiliki rata-rata 0,7754, yang menandakan bahwa, secara umum, tingkat ketergantungan kabupaten/kota pada pendanaan dari transfer pemerintah pusat masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota masih memerlukan dukungan pendanaan dari pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

4. Kemandirian Keuangan Daerah (MKD) dengan nilai terendah (*minimum*) adalah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 sebesar 0,13 sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 1,13 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk kemandirian keuangan daerah sebesar 0,2832. Rendahnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya lebih mengandalkan asal pendanaan yang berasal dari perolehan transfer dan pinjaman daerah bila dikomparasikan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tingginya kemandirian keuangan daerah di Kota Semarang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya lebih mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari PAD bila dikomparasikan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Kemandirian Keuangan Daerah (MKD) dengan rata-rata 0,2832, mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah masih rendah. Rata-rata yang rendah menunjukkan bahwa sumber pendanaan lokal belum cukup memadai untuk mendanai pembangunan tanpa bantuan pemerintah pusat.
5. Kinerja PAD (EPAD) dengan nilai terendah (*minimum*) adalah Kota Tegal pada tahun 2023 sebanyak 0,81 sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebanyak 2,51 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk efektivitas PAD sebesar 1,1027.

Rendahnya efektivitas PAD di Kota Tegal pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Tegal belum efektif dalam melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, retribusi, dan PAD lainnya untuk mencapai realisasi PAD yang telah ditargetkan dalam APBD bila dikomparasikan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tingginya efektivitas PAD di Kota Pekalongan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan lebih efektif dalam kegiatan pemungutan pajak, retribusi, dan PAD lainnya untuk mencapai target PAD bila dikomparasikan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (EPAD) dengan rata-rata 1,1027 menunjukkan bahwa kabupaten/kota secara keseluruhan cukup efektif dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan, meskipun terdapat variasi dalam efektivitas antar daerah.

6. Efektivitas Pajak (EP) dengan nilai terendah (*minimum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2021 sebanyak 0,72 sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 sebesar 2,74 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk efektivitas pajak sebanyak 1,0754.

Rendahnya efektivitas pajak di Kota Semarang pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Semarang belum optimal dalam memungut dan mengelola pajak daerah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pajak kepada masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola pajak, dan kurangnya upaya dalam pengawasan dan penegakan aturan terkait pajak daerah. Kondisi ini

menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak yang ada belum dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan tingginya efektivitas pajak di Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali mampu memaksimalkan potensi penerimaan pajak melalui berbagai strategi, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, perbaikan sistem pemungutan pajak, dan peningkatan kesadaran wajib pajak. Dengan efektivitas pajak yang tinggi, Kabupaten Boyolali dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dari sektor pajak daerah, sehingga dapat lebih mandiri dalam mendanai perkembangan daerah dikomparasikan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Efektivitas Pajak (EP) memiliki rata-rata sebesar 1,0754, yang menunjukkan bahwa, rata-rata, kabupaten/kota di Jawa Tengah cukup efektif dalam pengumpulan pajak daerah. Efektivitas ini bervariasi antar daerah, menunjukkan beberapa daerah yang mampu mengoptimalkan potensi pajak dan daerah lainnya yang masih memiliki kendala.

7. Penyaluran Belanja Modal (BM) dengan nilai terendah (*minimum*) adalah Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 75,19 milyar sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 1089,36 milyar dan nilai rata-rata (*mean*) untuk alokasi belanja modal sebesar 305,7215 milyar.

Rendahnya alokasi belanja modal di Kota Salatiga pada tahun 2022 mengindikasikan jika Pemerintah Kota Salatiga kurang mengandalkan belanja modal sebagai investasi daerah dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja

daerahnya bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tingginya penyaluran belanja modal di Kota Semarang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang lebih mengandalkan belanja modal untuk tugas pemerintahan dan pelayanan publik bila dikomparasikan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Penyaluran Belanja Modal (BM) dengan rata-rata 305,7215 miliar rupiah menunjukkan bahwa secara umum, kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalokasikan belanja modal yang cukup besar untuk investasi daerah, walaupun terdapat perbedaan yang signifikan antara daerah dengan alokasi belanja modal tertinggi dan terendah.

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi klasik yang akan dikerjakan meliputi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013), tujuan dari uji normalitas adalah untuk menilai apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas studi ini memakai uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, namun jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03409537
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.055
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.278
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.266
	Upper Bound	.289

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4 Kesimpulan Hasil Uji Normalitas

Model	Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	Kriteria	Simpulan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,200 ^d	$p > 0,05$	Data berdistribusi normal

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai asymp. Sig (2-tailed) senilai $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2013), uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk memastikan bahwa model regresi memiliki korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen yang digunakan. Apabila model regresi yang diuji memiliki korelasi yang tinggi atau sempurna pada variabel bebas maka model regresi dinyatakan mengandung gejala multikolinier, model regresi dinyatakan baik apabila tidak ada korelasi antar variabel. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF dinyatakan tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 maka model penelitian dinyatakan tidak memiliki gejala multikolinieritas. Berikut hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta	t			Sig.
1	(Constant)	4.633	.020		227.369	.000		
	X1	.164	.008	.863	19.527	.000	.194	5.152
	X2	-.031	.001	-.615	-31.333	.000	.984	1.016
	X3	-.053	.019	-.129	-2.776	.007	.177	5.658
	X4	-.020	.006	-.069	-3.157	.002	.795	1.258
	X5	.013	.007	.043	1.949	.054	.785	1.274
	X6	-.005	.003	-.036	-1.635	.105	.767	1.304

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Hasil uji multikolinieritas dapat disimpulkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Kesimpulan Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Batas	VIF	Batas	Kesimpulan
X1	0,194	>0,1	5.152	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
X2	0,984	>0,1	1.016	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
X3	0,177	>0,1	5.658	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
X4	0,795	>0,1	1.258	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
X5	0,785	>0,1	1.274	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
X6	0,767	>0,1	1.304	<10	Tidak terjadi multikolinearitas

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013), uji autokorelasi ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji run test jika didapat hasil nilai asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka disimpulkan tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel bebas. Berikut hasil pengujian autokorelasi:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.18566
Cases < Test Value	52
Cases >= Test Value	53
Total Cases	105
Number of Runs	47
Z	-1.274
Asymp. Sig. (2-tailed)	.203

a. Median

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Tabel 4. 8 Kesimpulan Hasil Uji Autokorelasi

Model	Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	Kriteria	Simpulan
Run Test	0,203	> 0,05	Data berdistribusi normal

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai asymp. Sig (2-tailed) senilai $0,203 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013) menyatakan uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varians dari satu residual pengamatan ke pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas muncul apabila model regresi memiliki nilai yang sama, diharapkan model regresi adalah residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya yang konstan. Uji Heteroskedastiditas dapat dilakukan dengan Metode Glejser, metode ini meregresikan antara variabel bebas yang digunakan terhadap nilai mutlak residualnya. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan sebaliknya jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.002	.001		1.209	.229
	X1	-.001	.002	-.403	-.855	.395
	X2	-.001	.001	-.279	-.709	.480
	X3	.000	.001	.107	.241	.810
	X4	.000	.000	-.106	-.908	.366
	X5	-2.627E-5	.000	-.020	-.175	.861
	X6	-3.170E-7	.000	-.201	-1.402	.164

a. Dependent Variable: AbRES

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

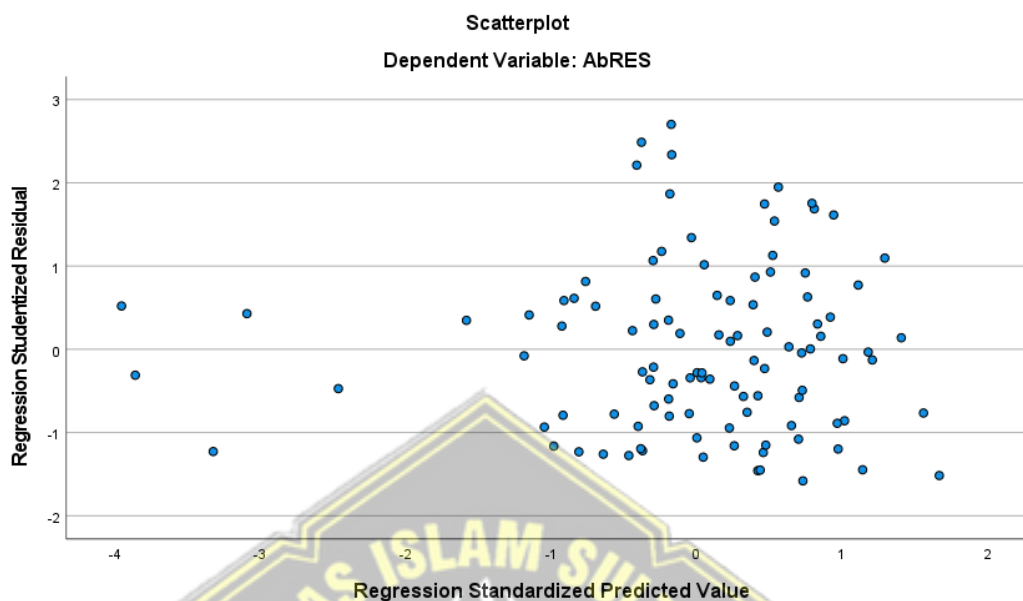
Tabel 4. 10 Kesimpulan Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikansi	Kriteria	Kesimpulan
X1	0.229	>0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
X2	0.395	>0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
X3	0.480	>0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
X4	0.810	>0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
X5	0.366	>0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
X6	0.861	>0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menandakan nilai signifikan dari seluruh variabel lebih dari 0,05 yang berarti model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

Begitu pula pada uji Scatterplot data dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Scatterplot bisa diamati pada Gambar 4.1. Diketahui pada Gambar 4.1 di bawah bahwa titik-titik pada grafik terlihat tidak terhimpun pada satu tempat, maka bisa dinyatakan jika studi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4. 1 Hasil Uji Scatterplot



Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

4.2.3 Pengujian Kelayakan Model

Metode analisis ini menjadi salah satu analisis yang banyak digunakan karena mudah dan memiliki kekuatan yang cukup dalam menjelaskan pengaruh suatu variabel bebas ke variabel terikatnya adapun pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.2.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F dan sig. hitung nilainya lebih kecil dari pada F tabel dan sig. hitung lebih kecil dari 0,05 sehingga pada kondisi ini dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak

digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji F berdasarkan perhitungan manual menggunakan F tabel:

1. Jika nilai sig $< 0,05$ atau F hitung $> F$ tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y;
2. Jika nilai sig $> 0,05$ atau F hitung $< F$ tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

$$F \text{ tabel} = F (k ; n - k)$$

k : jumlah variabel bebas

n : jumlah sampel

Maka diketahui F tabel yaitu $F (6 ; 99) = 2,19$

Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan nilai sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2019.330	10	201.933	848.270	<.001 ^b
	Residual	22.377	94	.238		
	Total	2041.707	104			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4, X5, X6, X1_X6, X2_X6, X3_X6, X4_X6, X5_X6

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Tabel 4. 12 Kesimpulan Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

F-hitung	Sign.	Simpulan
848.270	<0,001 ^b	Berpengaruh Simultan

Hasil dari tabel di atas menandakan jika nilai F-hitung adalah 848,270 yang lebih besar daripada F-tabel 2,19 dengan nilai bobot $< 0,001^b$ ($p < 0,05$). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan

keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pajak daerah, alokasi belanja modal dengan rasio derajat desentralisasi, alokasi belanja modal dengan rasio ketergantungan keuangan daerah, alokasi belanja modal dengan rasio kemandirian keuangan daerah, alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas pajak daerah secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²).

Koefisien determinasi diuji untuk menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya atau dapat dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi linear berganda diukur oleh nilai Adjusted R square dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Uji R²

Model	R	Model Summary ^b		Std. Error of the Estimate
		R Square	Adjusted R Square	
1	.995 ^a	.989	.988	.48791

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4, X5, X6, X1_X6, X2_X6, X3_X6, X4_X6, X5_X6

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Jika dilihat pada tabel diatas, maka nilai Adjusted R square besarnya adalah 0,988 atau 98,8%. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan sebesar 98,8% oleh variabel independen yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pajak daerah,

alokasi belanja dengan rasio derajat desentralisasi, alokasi belanja dengan rasio ketergantungan keuangan daerah, alokasi belanja modal dengan rasio kemandirian keuangan daerah, alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas pajak daerah. Sedangkan 1,1% variasi indeks pembangunan manusia dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen penelitian ini.

4.2.3.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel keuangan daerah, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efektivitas pajak, serta variabel moderasi belanja modal, terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada periode 2021-2023.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	56.956	1.672		34.067	<.001
	X1	104.587	7.517	1.803	13.914	<.001
	X2	-2.194	.043	-.570	-51.112	<.001
	X3	-36.668	5.277	-1.174	-6.949	<.001
	X4	3.466	1.129	.156	3.068	.003
	X5	2.194	.845	.060	2.596	.011
	X1_X6	-.040	.019	-.748	-2.076	.041
	X2_X6	.014	.004	.300	3.189	.002
	X3_X6	.027	.010	.971	2.866	.005
	X4_X6	-.015	.004	-.584	-3.679	<.001
	X5_X6	.006	.001	.233	4.207	<.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dari hasil uji regresi linier berganda yang tertera pada Tabel 4.11, didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 56,956 + 104,587X_1 - 2,194X_2 - 36,668X_3 + 3,466X_4 + 2,194X_5 - 0,040X_1 X_6 + 0,014X_2 X_6 + 0,027X_3 X_6 - 0,015X_4 X_6 + 0,006X_5 X_6 + e$$

Rumus diatas bisa dijabarkan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 56,956 menunjukkan bahwa variabel rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pajak daerah, alokasi belanja modal, alokasi belanja dengan rasio ketergantungan keuangan daerah, alokasi belanja modal dengan rasio kemandirian keuangan daerah, alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas pajak daerah jika nilainya 0 maka indeks pemabngunan manusia memiliki tingkat kinerja sebesar 56,956.
- b. Nilai koefisien Rasio Derajat Disentralisasi (X_1) sebesar 104,587 dengan nilai positif. Hal ini bermakna jika setiap kenaikan Rasio Derajat Disentralisasi sejumlah 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sejumlah 104,587% dengan dugaan variabel yang lain konstan.
- c. Nilai koefisien rasio ketergantungan keuangan daerah (X_2) sejumlah 2,194 dengan nilai negatif. Hal ini bermakna jika setiap penurunan rasio ketergantungan keuangan daerah sejumlah 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sejumlah 2,194% dengan dugaan variabel yang lain konstan.

- d. Nilai koefisien rasio kemandirian keuangan daerah (X3) sebesar 36,668 dengan nilai negatif. Hal ini bermakna jika setiap penurunan rasio kemandirian keuangan daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 36,668% dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- e. Nilai koefisien rasio efektivitas perolehan asli daerah (X4) sejumlah 3,466 dengan nilai positif. Hal ini bermakna jika setiap kenaikan rasio efektivitas perolehan asli daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 3,466% dengan dugaan variabel yang lain konstan.
- f. Nilai koefisien rasio efektivitas pajak daerah (X5) sebesar 2,194 dengan nilai positif. Hal ini bermakna jika setiap kenaikan rasio efektivitas pajak daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 2,194% dengan dugaan variabel yang lain konstan.
- g. Nilai koefisien antara penyaluran belanja modal dengan rasio derajat desentralisasi (X1_X6) sejumlah 0,040 dengan nilai negatif. Hal ini bermakna jika setiap kenaikan antara penyaluran belanja modal dengan rasio derajat desentralisasi sebanyak 1% maka indeks perkembangan manusia akan menurun sejumlah 0,040% dengan dugaan variabel yang lain konstan.
- h. Nilai koefisien antara antara penyaluran belanja modal dengan rasio ketergantungan keuangan daerah (X2_X6) sebanyak 0,014 dengan nilai positif. Hal ini bermakna jika setiap kenaikan antara penyaluran belanja modal dengan rasio ketergantungan keuangan daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 0,014% dengan dugaan

variabel yang lain konstan.

- i. Nilai koefisien antara antara penyaluran belanja modal dengan rasio kemandirian keuangan daerah ($X3_X6$) sebanyak 0,027 dengan nilai positif. Hal ini bermakna jika setiap kenaikan antara antara penyaluran belanja modal dengan rasio kemandirian keuangan daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 0,027% dengan dugaan variabel yang lain konstan.
- j. Nilai koefisien antara antara alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas perolehan asli daerah ($X4_X6$) sebanyak 0,015 dengan nilai negatif. Hal ini bermakna jika setiap penurunan antara antara alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas perolehan asli daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sebanyak 0,015% dengan dugaan variabel yang lain konstan.
- k. Nilai koefisien antara antara alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas pajak daerah ($X5_X6$) sebanyak 0,006 dengan nilai positif. Hal ini bermakna bahwa setiap kenaikan antara antara alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas pajak daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 0,006% dengan dugaan variabel yang lain konstan.

4.2.3.4 Hasil Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya, adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Dalam penelitian ini menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$) untuk rasio desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak, dan moderasi alokasi belanja modal. Tingkat kepercayaan 95%, alfa 0,05 dalam menentukan apakah hipotesis diterima atau tidak adalah melihat nilai sig <0,05 atau t-hitung. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). Sedangkan jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Adapun t hitung yang menjadi dasar penentuan kesimpulan dalam uji ini, dapat dihitung sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = T(\alpha/2; n-k-1)$$

$$T \text{ tabel} = T(0,05/2; 105-6-1)$$

$$T \text{ tabel} = T(0,025; 98)$$

$$T \text{ table} = 1,98447.$$

Berdasarkan hipotesis penelitian, didapatkan hasil uji sebagai berikut:

- H1 : Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM;
- H2 : Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM;
- H3 : Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap IPM;
- H4 : Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap IPM;
- H5 : Rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh positif terhadap IPM;
- H6 : Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio derajat desentralisasi

terhadap IPM;

H7 : Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio ketergantungan

keuangan daerah terhadap IPM;

H8 : Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan

daerah terhadap IPM;

H9 : Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio efektivitas PAD

terhadap IPM;

H10 : Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio efektivitas pajak daerah

terhadap IPM.

Berdasarkan table 4.10, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel rasio derajat desentralisasi (X1), diketahui sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $13,914 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 104,587 bernilai positif yang memiliki arti bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka **H1 diterima**.
- b. Variabel rasio ketergantungan keuangan daerah (X2), diketahui sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $-51,112 < -1,98447$ serta koefisien sebesar -2,194 bernilai negatif yang memiliki arti bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka **H2 diterima**.
- c. Variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X3), diketahui sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung

-6,949 < -1,98447 serta koefisien sebesar -36,668 bernilai negatif yang memiliki arti bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka **H3 ditolak**.

- d. Variabel rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X4), diketahui sig untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,068 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 3,466 bernilai positif yang memiliki arti bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka **H4 diterima**.
- e. Variabel rasio efektivitas pajak daerah (X5), diketahui sig untuk pengaruh X5 terhadap Y adalah sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,596 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 2,194 bernilai positif yang memiliki arti bahwa rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka **H5 diterima**.
- f. Variabel rasio derajat desentralisasi dimoderasi alokasi belanja modal (X6), diketahui sig untuk pengaruh X6 terhadap Y adalah sebesar $0,041 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,076 < -1,98447$ serta koefisien sebesar -0.040 bernilai negatif yang memiliki arti bahwa alokasi belanja modal memperlemah pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap IPM, maka **H6 ditolak**.
- g. Variabel rasio ketergantungan keuangan daerah (X7), diketahui sig untuk pengaruh X7 terhadap Y adalah sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung

3,189 > 1,98447 serta koefisien sebesar 0,014 bernilai positif yang memiliki arti bahwa alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap IPM, maka **H7 diterima**.

- h. Variabe rasio kemandirian keuangan daerah (X8), diketahui sig untuk pengaruh X8 terhadap Y adalah sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,866 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 0,027 bernilai positif yang memiliki arti bahwa alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM, maka **H8 diterima**.
- i. Variabe rasio efektivitas PAD (X9), diketahui sig untuk pengaruh X9 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $-3,679 < -1,98447$ serta koefisien sebesar -0,015 bernilai negatif yang memiliki arti bahwa alokasi belanja modal memperlemah pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap IPM, maka **H9 ditolak**.
- j. Variabe rasio efektivitas pajak daerah (X10), diketahui sig untuk pengaruh X10 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,207 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 0,006 bernilai positif yang memiliki arti bahwa alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio efektivitas pajak daerah terhadap IPM, maka **H10 diterima**.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang peran belanja modal dalam memoderasi hubungan antara rasio keuangan pemerintah daerah dan IPM (studi empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun

2021-2023), maka dapat dilakukan interpretasi hasil sebagai berikut:

4.5.1. Hubungan Rasio Derajat Desentralisasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah

Rasio Derajat Desentralisasi dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan dengan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah. Berdasarkan tabel 1.10 pada uji T diketahui rasio derajat desentralisasi memiliki signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $13,914 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 104,587 bernilai positif yang memiliki arti bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Setiap kenaikan Rasio Derajat Desentralisasi sejumlah 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sejumlah 104,587% dengan dugaan variabel yang lain konstan, maka dari hasil tersebut **H1 diterima**.

Hal ini disebabkan rasio derajat desentralisasi menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin leluasa pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran yang secara langsung bermanfaat bagi pembangunan manusia, yaitu peningkatan indeks harapan hidup yang ditunjukkan dengan peningkatan angka kelahiran bayi yang selamat, indeks pendidikan yang ditunjukkan dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup yang layak yang ditunjukkan dengan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Anggraini (2015) yang meneliti pengaruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap IPM. Hasil penelitiannya antara lain menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian juga telah mendukung teori desentralisasi fiskal antara lain yang menyatakan bahwa dengan adanya pelimpahan kewenangan, anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat.

4.5.2. Hubungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Rasio ketergantungan keuangan daerah yang diukur dengan membandingkan pendapatan transfer dan total pendapatan daerah. Berdasarkan tabel 1.10 pada uji T diketahui rasio derajat ketergantungan keuangan daerah memiliki signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $-51,112 < -1,98447$ serta koefisien sebesar $-2,194$ bernilai negatif yang memiliki arti bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Setiap penurunan rasio ketergantungan keuangan daerah sejumlah 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sejumlah 2,194% dengan dugaan variabel yang lain konstan, maka dari hasil tersebut **H2 diterima**.

Hal ini disebabkan rasio ketergantungan keuangan mencerminkan seberapa besar pendapatan transfer yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan penyediaan prasarana publik, sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya

kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM. Pengaruh rasio ketergantungan keuangan tersebut memiliki hubungan yang negatif, karena sebagai wujud otonomi daerah, pemerintah daerah akan semakin berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja pembangunan daerah tanpa tergantung sumber pendanaan dari pemerintah pusat atau dana transfer. Pemerintah daerah diharapkan semakin menurunkan ketergantungan keuangan dari pendapatan transfer, dan meningkatkan pendapatan daerah dengan PAD sebagai sumber keuangan terbesarnya, untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran yang mendukung pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan penduduknya. Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sebaiknya hanya digunakan untuk belanja pegawai baik berupa gaji, tunjangan, dan honorarium kegiatan untuk mendukung paritas daya beli masyarakat terhadap barang konsumsi dan non konsumsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan Halim (2007) bahwa ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hasil penelitian juga telah mendukung teori desentralisasi fiskal dan pernyataan yang dikemukakan Waluyo (2007) bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan PAD sehingga daerah dapat benar-benar otonom.

4.5.3. Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan transfer pemerintah pusat dan transfer Pemerintah provinsi. Berdasarkan tabel 1.10 pada uji T diketahui rasio kemandirian keuangan daerah memiliki signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $-6,949 < -1,98447$ serta koefisien sebesar $-36,668$ bernilai negatif yang memiliki arti bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Setiap penurunan rasio kemandirian keuangan daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 36,668% dengan asumsi variabel yang lain konstan, maka dari hasil tersebut **H3 ditolak**.

Hal ini disebabkan rasio kemandirian keuangan menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah menggunakan PAD dan meminimalisasi pendanaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman daerah. Namun pengaruh rasio kemandirian keuangan tersebut memiliki hubungan yang negatif karena diduga walaupun pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah telah berusaha mengurangi ketergantungan pendanaan dari dana transfer, pemerintah daerah menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman kepada pemerintah pusat, yaitu pendanaan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Pinjaman dari PIP

tersebut diperuntukkan untuk belanja pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan, dan belum terkait langsung dengan pembangunan manusia, seperti sarana/prasarana kesehatan dalam rangka peningkatan angka kelahiran bayi yang selamat, fasilitas pendidikan dalam rangka peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan standar hidup yang layak melalui pemberian bantuan sosial atau hibah kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Anggraini (2015) yang meneliti pengaruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap IPM. Hasil penelitiannya antara lain menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap IPM, namun memiliki hubungan yang negatif. Hasil penelitian juga telah mendukung teori keagenan yaitu adanya konflik keagenan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menetapkan pendapatan transfer dan pinjaman daerah pada APBD.

4.5.4. Hubungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan PAD dan target penerimaan PAD. Berdasarkan tabel 1.10 pada uji T diketahui rasio efektivitas pendapatan asli daerah memiliki signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,068 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 3,466 bernilai positif yang memiliki arti bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Setiap kenaikan rasio

efektivitas perolehan asli daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 3,466% dengan dugaan variabel yang lain konstan, maka dari hasil tersebut **H4 diterima**.

Hal ini disebabkan rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai dengan yang ditargetkan secara efektif, sehingga diharapkan memiliki sumber daya keuangan atau pendanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penyediaan layanan publik yang terkait langsung dengan pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang mempengaruhi paritas daya beli masyarakat serta menjadi indikator IPM. Selain itu, dengan tercapainya target PAD berarti masyarakat telah mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan intensifikasi pemungutan pajak yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suryaningsih, et.al (2015) yang meneliti dampak kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah, dan upaya pemungutan PAD berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian juga telah mendukung teori keagenan yaitu dalam proses penetapan target atau anggaran PAD, DPRD selaku principal memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah selaku agent untuk mengusulkan target PAD.

4.5.5. Hubungan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Rasio efektivitas pajak daerah diukur dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah. Berdasarkan tabel 1.10 pada uji T diketahui rasio efektivitas pendapatan asli daerah memiliki signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,596 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 2,194 bernilai positif yang memiliki arti bahwa rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Setiap kenaikan rasio efektivitas pajak daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 2,194% dengan dugaan variabel yang lain konstan, maka dari hasil tersebut **H5 diterima**.

Hal ini disebabkan rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketika pemerintah daerah mampu mengumpulkan pajak secara efektif, mereka memperoleh tambahan dana untuk mendanai berbagai program pembangunan yang langsung atau tidak langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dana dari pajak ini digunakan untuk investasi di sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Davoodi & Zou (1998) menyatakan bahwa Average Tax Rate memiliki pengaruh positif yang signifikan

terhadap Per Capita Output Rate, yang kemudian menjadi dasar untuk meningkatkan Human Development Index. Hasil penelitian juga telah mendukung teori keagenan, di mana dalam konteks penetapan target penerimaan pajak, DPRD sebagai prinsipal memberikan mandat kepada pemerintah daerah selaku agen untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dengan target yang realistis namun menantang.

4.5.6. Hubungan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Rasio Derajat Desentralisasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 4.10 pada uji T diketahui rasio derajat desentralisasi dimoderasi alokasi belanja modal memiliki signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,076 < -1,98447$ serta koefisien sebesar -0.040 bernilai negatif yang memiliki arti bahwa alokasi belanja modal memperlemah pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Setiap kenaikan alokasi belanja modal dengan rasio derajat desentralisasi sebanyak 1% maka indeks perkembangan manusia akan menurun sejumlah 0,040% dengan dugaan variabel yang lain konstan, maka dari hasil tersebut **H6 ditolak**.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal signifikan untuk memoderasi pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap IPM, namun alokasi belanja modal memperlemah pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap IPM. Hal ini diduga disebabkan rasio derajat desentralisasi yang menggambarkan

kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD, telah dialokasikan sebagai sumber pembiayaan belanja modal dalam rangka menunjang program peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat, namun jumlah PAD belum cukup untuk memenuhi besarnya kebutuhan belanja modal dan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan pendidikan, kesehatan, dan komoditas makanan atau non makanan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Adiputra, et. al. (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara langsung terhadap IPM, namun PAD tidak memiliki pengaruh terhadap IPM melalui alokasi belanja modal. Penelitian ini juga mendukung teori desentralisasi fiskal, yang menyatakan bahwa dengan adanya pelimpahan kewenangan, anggaran daerah untuk pelayanan publik, seperti alokasi belanja modal, dapat lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat.

4.5.7. Hubungan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 4.10 pada uji T diketahui rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,189 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 0,014 bernilai positif yang memiliki arti bahwa alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap IPM, setiap kenaikan antara alokasi belanja modal dengan rasio

ketergantungan keuangan daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 0,014% dengan dugaan variabel yang lain konstan, maka dari hasil tersebut **H7 diterima**.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal signifikan dalam memperkuat pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat disebabkan oleh ketergantungan keuangan daerah yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ketika dana ini dialokasikan secara efektif dalam bentuk belanja modal, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan alokasi belanja modal yang lebih optimal, ketergantungan keuangan daerah tidak selalu menjadi hambatan dalam meningkatkan IPM, melainkan justru dapat membantu daerah untuk memanfaatkan transfer dana pusat guna mengurangi ketimpangan dan meningkatkan akses terhadap layanan publik. Ini mencerminkan bahwa, meskipun ketergantungan keuangan tinggi, daerah masih mampu menggunakan dana yang ada secara produktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alexiou (2009) dan Evlyn & Rahayu (2018), yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, alokasi belanja modal yang diarahkan pada infrastruktur seperti pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan

kualitas hidup masyarakat. Penelitian Christy & Adi (2009) juga menegaskan bahwa belanja modal daerah, khususnya untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung. Peningkatan kualitas pendidikan ini, pada akhirnya, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Hasil ini juga mendukung teori keagenan, di mana pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang efektif sesuai mandat dari pemerintah pusat atau DPRD. Penggunaan belanja modal yang optimal menunjukkan peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

4.5.8. Hubungan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 4.10 pada uji T diketahui rasio kemandirian keuangan daerah memiliki signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,866 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 0,027 bernilai positif yang memiliki arti bahwa alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM, setiap kenaikan antara antara penyaluran belanja modal dengan rasio kemandirian keuangan daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 0,027% dengan dugaan variabel yang lain konstan, maka dari hasil tersebut **H8 diterima**.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal signifikan dalam memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan suatu daerah—yang menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan layanan publik dengan sumber daya sendiri—semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan IPM ketika didukung oleh belanja modal yang tepat. Ketika alokasi belanja modal diarahkan secara strategis, misalnya untuk membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan atau meningkatkan kualitas layanan publik, maka daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi dapat mengoptimalkan dana yang ada untuk memperkuat kesejahteraan masyarakatnya. Belanja modal yang diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung kualitas hidup ini membantu daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, kemandirian keuangan yang didukung oleh belanja modal yang efektif mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.

Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Setyowati & Suparwati (2012), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan bagian dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbukti memiliki dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengalokasian belanja modal.

4.5.9. Hubungan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan tabel 4.10 pada uji T diketahui rasio efektivitas PAD memiliki signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $-3,679 < -1,98447$ serta koefisien sebesar $-0,015$ bernilai negatif yang memiliki arti bahwa alokasi belanja modal memperlemah pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap IPM, setiap penurunan antara alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas perolehan asli daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sebanyak 0,015% dengan dugaan variabel yang lain konstan, maka dari hasil tersebut **H₀ ditolak**.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya efektivitas pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber asli belum optimal. Ketika efektivitas PAD rendah, kontribusi pendapatan ini terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga cenderung terbatas. Alokasi belanja modal yang signifikan, dalam kondisi efektivitas PAD yang rendah, justru memperlemah hubungan antara PAD dan IPM. Hal ini mungkin terjadi karena penggunaan belanja modal tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang efektif, sehingga dana yang dialokasikan melalui belanja modal tidak cukup berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik atau infrastruktur yang mendukung IPM. Penelitian ini mengindikasikan bahwa belanja modal tanpa diimbangi dengan PAD yang efektif kurang mampu meningkatkan IPM secara optimal, karena dana yang dihasilkan

daerah belum cukup kuat untuk mendanai pembangunan secara mandiri. Akibatnya, daerah yang memiliki PAD rendah mungkin lebih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan tidak memiliki fleksibilitas dalam penggunaan belanja modal untuk kebutuhan prioritas lokal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Evlyn & Rahayu (2018), di mana rasio efektivitas PAD tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap IPM. Penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa tanpa efektivitas yang optimal dalam mengumpulkan PAD, belanja modal yang dialokasikan mungkin tidak cukup untuk mendorong pembangunan manusia secara signifikan.

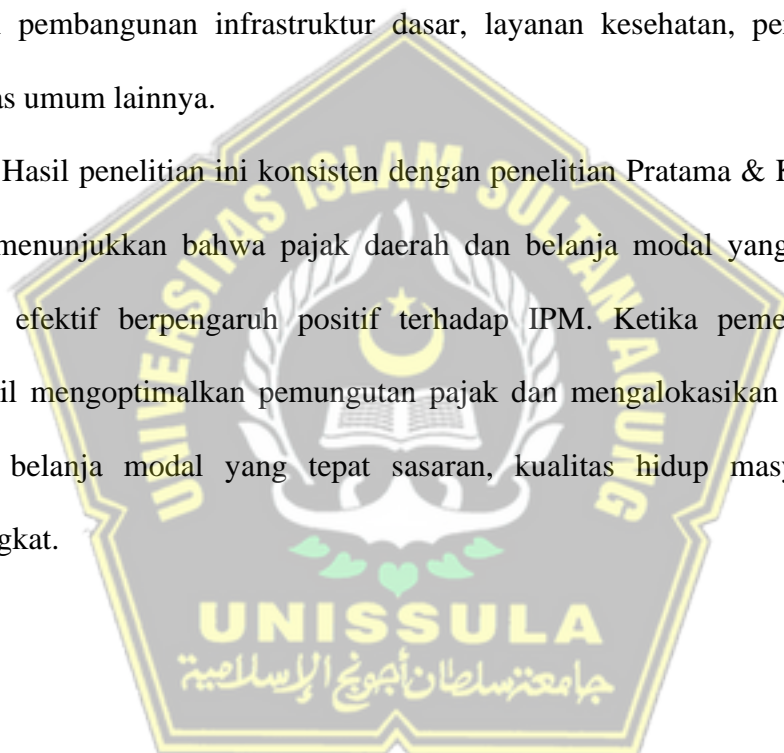
4.5.10. Hubungan Analisis Belanja Modal Memoderasi Rasio Efektifitas Pajak Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 4.10 pada uji T diketahui rasio efektivitas pajak daerah memiliki signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,207 > 1,98447$ serta koefisien sebesar 0,006 bernilai positif yang memiliki arti bahwa alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio efektivitas pajak daerah terhadap IPM, setiap kenaikan antara antara alokasi belanja modal dengan rasio efektivitas pajak daerah sejumlah 1% maka indeks perkembangan manusia akan naik sejumlah 0,006% dengan dugaan variabel yang lain konstan, maka dari hasil tersebut **H10 diterima**.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal memiliki peran signifikan dalam memperkuat pengaruh rasio efektivitas pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam efektivitas pemungutan pajak

daerah, yang diikuti dengan pengalokasian belanja modal yang baik, dapat berdampak positif pada IPM. Dalam konteks ini, peningkatan efektivitas pajak berarti bahwa pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dikelola dengan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Peningkatan efektivitas pajak yang diiringi dengan alokasi belanja modal yang tepat dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pratama & Kartika (2017) yang menunjukkan bahwa pajak daerah dan belanja modal yang dialokasikan secara efektif berpengaruh positif terhadap IPM. Ketika pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan pemungutan pajak dan mengalokasikan dana tersebut untuk belanja modal yang tepat sasaran, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM, sehingga H1 diterima.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM, sehingga H2 diterima.
3. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM, sehingga H3 ditolak.
4. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap IPM, sehingga H4 diterima.
5. Rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh positif terhadap IPM, sehingga H5 diterima.
6. Alokasi belanja modal memperlemah pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap IPM, sehingga H6 ditolak.
7. Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap IPM, sehingga H7 diterima.
8. Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM, sehingga H8 diterima.

9. Alokasi belanja modal memperlemah pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap IPM, sehingga H9 ditolak.
10. Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio efektivitas pajak daerah terhadap IPM, sehingga H10 diterima.

Pada uji F penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pajak daerah, dan moderasi alokasi belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan koefisien sebesar $<0,001^b$ ($0,001 < 0,05$). Pada penelitian ini uji r square menunjukkan sebesar 0,988 atau 98,8% sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independent berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 98,8%.

5.2 Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan manusia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah:

1. Implikasi bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menekankan bahwa rasio keuangan, seperti kemandirian dan desentralisasi, serta alokasi belanja modal, sangat berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Dengan demikian, daerah memiliki lebih banyak kontrol dalam pengalokasian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan manusia berkelanjutan.

2. Implikasi bagi Kebijakan Fiskal Nasional

Bagi pemerintah pusat, hasil studi ini mengindikasikan pentingnya dukungan yang seimbang terhadap kemandirian keuangan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal perlu terus ditingkatkan, dengan mempertimbangkan pemberian insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan IPM melalui pengelolaan keuangan yang mandiri dan alokasi belanja modal yang tepat. Kebijakan fiskal yang lebih fleksibel memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan manusia yang unik di tiap wilayah.

3. Implikasi bagi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Implikasi lain dari penelitian ini adalah pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pengalokasian belanja modal. Pemerintah daerah perlu membuat rencana strategis untuk alokasi belanja modal yang mengutamakan sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, yang langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, belanja modal dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap IPM dan menciptakan pembangunan manusia yang lebih merata.

4. Implikasi bagi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan

Temuan ini juga memberikan implikasi bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah harus diperkuat. Pemerintah daerah

diharapkan mampu mempertanggungjawabkan setiap alokasi belanja modal, terutama pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada IPM. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi sejauh mana anggaran publik dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hubungan antara rasio keuangan daerah, belanja modal, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Keterbatasan Data dan Periode Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan data dari periode 2021 hingga 2023. Periode yang relatif singkat ini dapat membatasi pemahaman terhadap dinamika jangka panjang hubungan antara keuangan daerah dan IPM. Selain itu, data yang diperoleh terbatas pada data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan keuangan daerah, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual atau variasi dari tahun ke tahun.

2. Terbatas pada Variabel-variabel Tertentu

Penelitian ini hanya menggunakan variabel rasio keuangan seperti derajat desentralisasi, keterikatan, kemandirian, efektivitas PAD, dan efektivitas pajak daerah. Faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi IPM, seperti tingkat partisipasi masyarakat, kualitas manajemen pemerintahan, atau kondisi sosial-ekonomi yang berbeda antar daerah, tidak dimasukkan dalam

model penelitian ini. Hal ini bisa membatasi kesimpulan yang dapat diambil terkait faktor-faktor lain yang mungkin juga memengaruhi IPM.

3. Keterbatasan Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan variabel moderasi. Metode ini mungkin tidak cukup untuk menangkap kompleksitas hubungan dinamis antara variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan yang lebih kompleks, seperti analisis longitudinal atau metode kausalitas, mungkin dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat mengenai pengaruh jangka panjang dan interaksi antar variabel.

4. Generalizabilitas Terbatas pada Wilayah Penelitian

Hasil penelitian ini difokuskan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga generalisasi hasilnya mungkin terbatas jika diterapkan di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan kondisi keuangan yang berbeda. Oleh karena itu, temuan ini perlu dikaji kembali jika diterapkan pada daerah dengan konteks dan kebijakan fiskal yang berbeda.

5. Keterbatasan Akurasi Pengukuran

Penggunaan data sekunder yang bergantung pada laporan keuangan pemerintah daerah dan data BPS mungkin menyimpan risiko ketidaktepatan atau kesalahan pencatatan. Akurasi dan konsistensi dalam pencatatan data menjadi krusial, terutama dalam penilaian rasio keuangan yang dapat berpengaruh pada hasil penelitian.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, beberapa agenda penelitian mendatang dapat diarahkan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaruh keuangan daerah terhadap pembangunan manusia. Adapun agenda penelitian mendatang yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan Periode dan Variasi Data

Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan data dengan periode yang lebih panjang dan mencakup lebih banyak tahun. Hal ini akan memungkinkan analisis tren jangka panjang yang lebih komprehensif, serta memberikan gambaran yang lebih stabil mengenai dampak rasio keuangan dan belanja modal terhadap IPM. Selain itu, variasi data yang lebih luas, seperti data primer yang mencakup wawancara atau survei dengan pemangku kepentingan lokal, dapat menambah kedalaman analisis.

2. Penambahan Variabel Lain yang Relevan

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi IPM, seperti kualitas manajemen pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan. Variabel-variabel sosial-ekonomi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

3. Penggunaan Metode Analisis yang Lebih Kompleks

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kausal antara variabel, penelitian mendatang dapat menggunakan metode

analisis yang lebih kompleks, seperti model regresi panel data, analisis jalur (path analysis), atau structural equation modeling (SEM). Pendekatan-pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel, serta memetakan dampak moderasi belanja modal secara lebih komprehensif.

4. Perbandingan Antar-Wilayah

Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan kajian komparatif antar provinsi atau wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi dan demografi berbeda. Pendekatan ini memungkinkan analisis perbedaan efek rasio keuangan dan belanja modal terhadap IPM di berbagai daerah, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor lokal yang berperan penting dalam peningkatan IPM.

5. Evaluasi Kebijakan Publik terkait Belanja Modal

Penelitian mendatang dapat fokus pada evaluasi kebijakan terkait alokasi belanja modal dalam mendukung pembangunan manusia. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan dan dioptimalkan, serta memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6. Kajian Dampak Pandemi atau Krisis Ekonomi terhadap IPM

Melihat dampak pandemi COVID-19 yang sangat besar terhadap ekonomi dan pembangunan manusia, penelitian mendatang juga dapat mengkaji pengaruh krisis kesehatan atau ekonomi terhadap IPM di tingkat daerah. Kajian ini akan

sangat relevan dalam memberikan wawasan mengenai adaptasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih responsif terhadap situasi krisis.



DAFTAR PUSTAKA

- Alexiou, C. (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research*, 11(1), 1–16.
- Anggraini, T. (2015). *Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Ardiansyah, V. A., & Widiyaningsih. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. In *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Christy, F. A., & Adi, P. H. (2009). Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. In *The 3rd National Conference UKWMS* (hal. 1–16).
- Daniel, T. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Daya Saing, dengan Kesenjangan Belanja Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah sebagai Pemoderasi (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. Skripsi. Universitas Udayana.
- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 8(1).
- Davoodi, H., & Zou, H.-F. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43(2), 244–257.
- Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(3), 106–114.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. *The Academy of Management Review*, 14(4), 532–550.
<https://doi.org/10.2307/258557>
- Evlyn, M., & Rahayu, Y. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–15.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. In

Simposium Nasional Akuntansi X (hal. 26–28).

- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140.
- Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 56–66. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216>
- Ismerdekaningsih, H., & Rahayu, E. S. (2002). *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak terhadap Product Domestick Bruto di Indonesia (Studi Tahun 1985-2002)*. Skripsi. ITB.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahmudi. (2012). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkoesebroto, G. (1997). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muluk, K. (2005). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Makassar: STIA LAN.
- Munir, D. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Pratama, I. G. N. P. T., & Kartika, I. N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6(11), 2233.
- Purbadharmaja, I. B. P., & Amalia, F. R. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(6), 16.
- Saftiana, Y., & Susantih, H. (2009). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. In *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 2409–2438.

- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap IPM dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Administrasi*, 9(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32. (2004). *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor 34. (2000). *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- UNDP. (1993). *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programme.
- Verawaty, & Salwa, S. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SILPA, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 89. Diambil dari <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Wulandari, E., Wahyudi, M., & Rani, U. (2018). Effect of Original Local Government Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Share Funds, Other Legal Revenues, Budget Surplus/Deficit to Human Development Index Through Capital Expenditures: Case Study of Regencies/Municipalities in. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(2), 125–137. Diambil dari <http://buscompress.com/journal-home.html>